



**ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP
PENDAPATAN NASIONAL DI INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh

**Nur Diana Arofah
NIM 120810101191**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2016**



**ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP
PENDAPATAN NASIONAL DI INDONESIA**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

oleh

**Nur Diana Arofah
NIM 120810101191**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2016**

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan puji syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta, yaitu Ayahanda Satuki dan ibunda Sholekah terima kasih atas keikhlasan do'a, semangat, pengorbanan, dan dorongan baik secara spiritual maupun materiil serta kasih sayang yang diberikan sehingga ananda bisa menyelesaikan skripsi ini;
2. Kakakku tersayang Siti Maria Ulfa, S.Pd dan Adikku Siti Nur Hidayati yang selalu mendukung, memberikan perhatian, motivasi, dan semangat yang diberikan untuk keberhasilan studiku selama ini;
3. Yang kuhormati guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan;
4. Almamater yang kubanggakan Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember sebagai tempat menimba ilmu.

MOTTO

*“Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan,
bersama kesulitan benar-benar ada kemudahan.”
(Terjemah QS. Al Insyirah: 5-6)*

*“Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan
sabar.”
(Khalifah ‘Umar)*

*“Pendidikan merupakan perlengkapan terbaik untuk hari tua.”
(Aristoteles)*

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Diana Arofah

NIM : 120810101191

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP PENDAPATAN NASIONAL DI INDONESIA” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 September 2016
Yang menyatakan,

Nur Diana Arofah
NIM 120810101191

SKRIPSI

**ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP
PENDAPATAN NASIONAL DI INDONESIA**

Oleh

Nur Diana Arofah
NIM 120810101191

Pembimbing:

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Regina Niken Wilantari. SE., M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Teguh Hadi Priyono. SE., M.Si

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Pendapatan Nasional di Indonesia
Nama : Nur Diana Arofah
Nim : 120810101191
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Konsentrasi : Ekonomi Moneter
Tanggal Persetujuan : 12 Agustus 2016

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Regina Niken Wilantari. S.E., M.Si
NIP. 1974091 3200112 2 001

Dr. Teguh Hadi Priyono S.E., M.Si
NIP. 1970020 6199403 1 002

Mengetahui
Ketua Jurusan

Dr. Sebastiana Viphindrartin M.Kes
NIP.1964110 8198902 2 001

PENGESAHAN

Judul Skripsi

**ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP PENDAPATAN
NASIONAL DI INDONESIA**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Nur Diana Arofah
NIM : 120810101191
Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

23 September 2016

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Dr. Siswoyo Hari Santosa S.E., M.Si.
NIP. 1968071 5199303 1 001 (.....)
2. Sekertaris : Prof. Dr. Mohammad Saleh M.Sc.
NIP. 1956083 1198403 1 002 (.....)
3. Anggota : Endah Kurnia Lestari S.E., M.E.
NIP. 1978041 4200112 2 003 (.....)



Mengetahui/Menyetujui

Universitas Jember
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan,

Dr. Moehammad.Fathorrazi, S.E., M.Si.
NIP. 1963061 4199002 1 001

Analisis Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Pendapatan Nasional di Indonesia

Nur Diana Arofah

*Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Jember*

ABSTRAK

Perkembangan perekonomian Indonesia tidak terlepas dari perkembangan perekonomian secara global. Selama kurun waktu tahun 2011 hingga tahun 2015, pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung moderat karena dinamika ekonomi global yang tidak sesuai perkiraan dan kebijakan stabilisasi yang diterapkan oleh Bank Indonesia dan Pemerintah. Kebijakan fiskal sebagai alat stabiliator berperan penting dalam menjaga stabilitas perekonomian secara makro melalui penyesuaian yang baik di bidang penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan fiskal terhadap pendapatan nasional di Indonesia yang diukur dengan Produk Domestik Bruto riil (PDB riil) Indonesia, dengan menggunakan data runtun waktu selama periode 1984 sampai dengan 2015. Hasil analisis dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan fiskal di Indonesia melalui penerimaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB riil di Indonesia. Pajak merupakan penerimaan negara yang terbesar sehingga memiliki peran penting dalam membiayai kegiatan negara dan mengurangi defisit anggaran di Indonesia. Sedangkan penerimaan negara bukan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PDB riil di Indonesia. Sebaliknya, pengeluaran pemerintah tidak signifikan dan positif terhadap pendapatan nasional di Indonesia. Hal ini karena pengeluaran pemerintah di Indonesia selalu melebihi penerimaannya sehingga sering terjadi defisit anggaran. Defisit anggaran menyebabkan timbulnya inflasi dan menurunkan PDB riil. Adanya hubungan positif antara pengeluaran pemerintah dengan PDB riil membuktikan bahwa pengeluaran pemerintah berperan penting dalam kelancaran kegiatan ekonomi.

Kata Kunci: *pajak, non pajak, pengeluaran pemerintah, dan PDB riil.*

Analysis of Fiscal Policy Impact toward the National Income in Indonesia

Nur Diana Arofah

*Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Jember*

ABSTRACT

Indonesia's economic development is inseparable from the development of the global economy. During the period 2011 to 2015, Indonesia's economic growth likely to moderate because the dynamics of the global economy is not as expected and stabilization policies implemented by Bank Indonesia and the Government. Fiscal policy as a stabilizer tool played an important role in maintaining the stability of the macro economy through adjustments both in the field of government revenues and expenditures. This study aims to analyze the impact of fiscal policy on Indonesia's national income as measured by real Gross Domestic Product (real GDP) of Indonesia, using time series data during the period from 1984 to 2015. The results of the analysis using Ordinary Least Square method (OLS) explained that the implementation of fiscal policy in Indonesia through tax revenues and significant positive effect on real GDP in Indonesia. Tax is the largest state revenue that has an important role in financing the activities of state and reduce the budget deficit in Indonesia. Meanwhile, non-tax revenue and a significant negative effect on real GDP in Indonesia. By contrast, government expenditure is not significant and positive impact on national income in Indonesia. This is because government spending in Indonesia has always exceeded revenues so often the case the budget deficit. Budget deficits cause inflation and lower real GDP. The existence of a positive relationship between government spending to real GDP proves that government spending plays an important role in the smooth running of economic activity.

Key words: *tax, non tax revenue, government spending, real GDP.*

RINGKASAN

Analisis Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Pendapatan Nasional di Indonesia; Nur Diana Arofah, 120810101191; 2016:115 halaman: Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Jember.

Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki perekonomian melalui penyesuaian di bidang penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Sistem pengelolaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang baik dapat meningkatkan pendapatan nasional. Penerimaan dan pengeluaran pemerintah di Indonesia diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama periode tahunan. Pelaksanaan APBN tidak terlepas dari pengaruh perkembangan berbagai faktor internal dan faktor eksternal. Perkembangan perekonomian dunia yang stabil akan berdampak positif bagi peningkatan pendapatan nasional di Indonesia.

Pemerintah selalu berupaya untuk menjaga perekonomian dalam negeri agar tetap stabil. Hal inilah salah satu alasan yang menyebabkan sistem kebijakan fiskal di Indonesia berubah-ubah. Pada masa orde baru, pemerintah menerapkan kebijakan anggaran berimbang dan dinamis dengan tujuan untuk menurunkan inflasi yang cukup besar pada masa tersebut. Melalui prinsip kebijakan anggaran tersebut dan kebijakan ekonomi makro yang berhati-hati menghasilkan penurunan laju inflasi dan peningkatan pendapatan nasional di Indonesia. Selain itu, perubahan dalam pembaharuan sistem penerimaan pajak di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam penerimaan pemerintah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dampak kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan pendapatan nasional di Indonesia yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto riil (PDB riil) Indonesia melalui variabel penerimaan negara dari pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan pengeluaran pemerintah secara keseluruhan. Data yang digunakan adalah data

sekunder tahunan selama periode tahun 1984 sampai dengan tahun 2015 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Nota Keuangan, Bank Indonesia, dan situs resmi lainnya. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis kuantitatif menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS).

Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan fiskal berpengaruh terhadap perkembangan pendapatan nasional di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis data membuktikan bahwa penerimaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB riil di Indonesia. Pajak merupakan penerimaan negara yang terbesar sehingga memiliki peran penting dalam membiayai kegiatan negara dan mengurangi defisit anggaran di Indonesia. Sementara itu, PNBPNP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PDB riil di Indonesia. Hal ini terjadi karena yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PNBPNP adalah penerimaan SDA Migas, dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat menyebabkan kebutuhan migas di Indonesia semakin besar sedangkan SDA migas adalah SDA yang tidak dapat diperbarui. Hal ini menyebabkan pemerintah Indonesia melakukan impor minyak untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan mengakibatkan pengeluaran untuk impor minyak semakin besar dan berpengaruh terhadap penurunan PDB riil di Indonesia. Selain itu, kegiatan industri pertambangan migas menyebabkan fungsi dan peranan lingkungan menjadi menurun karena semakin berkurangnya kemampuan lingkungan untuk mengolah limbah secara alami. Hal ini juga akan berdampak pada menurunnya PDB riil di Indonesia. Sebaliknya, pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PDB riil di Indonesia karena dari tahun ke tahun Indonesia sering mengalami defisit anggaran yang terus meningkat. Defisit anggaran menyebabkan timbulnya inflasi dan menurunkan pendapatan nasional. Adanya hubungan positif membuktikan bahwa pengeluaran pemerintah berperan penting dalam kelancaran kegiatan ekonomi baik di bidang produksi, distribusi, maupun konsumsi melalui pembangunan infrastruktur dan perbaikan diberbagai sektor secara efektif dan efisien.

PRAKATA

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, serta curahan nikmat berupa kekuatan jasmani dan rohani sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Pendapatan Nasional di Indonesia”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Moehammad Fathorrazi, SE., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Regina Niken Wilantari, SE., M.Si., selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, kritik, dan pengarahan dengan penuh kesabaran dalam penyelesaian skripsi ini;
3. Bapak Dr. Teguh Hadi Priyono, SE., M.Si., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Ibu Dr. Sebastiana Viphindartin, M.Kes., selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta Staf Karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Staf Edukatif dan Administratif Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Perpustakaan POMA Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Perpustakaan Pusat Universitas Jember yang telah memberikan fasilitas dalam kelancaran penyusunan skripsi ini;
7. Ayahanda Satuki dan Ibunda Sholekah yang telah memberikan kasih sayang, cinta, do'a, dukungan baik berupa moral, spiritual dan material serta nasehat yang tiada tara kepada penulis;

8. Kakakku Siti Maria Ulfa S.Pd dan adik perempuanku Siti Nur Hidayati yang telah memberikan semangat dan dukungan serta nasehat selama ini;
9. Teman dekatku Rohmad Zulianto, Muhammad Amin, Adita, Nanda, Natalia, Fahrur Nisak, Ulfiyatul Fasihah, Ratna Rima, Dias Wahyu, Eni Nurmayanti, Eliya, Ida Nurmala, Sunda Maria, Khoiro, dan Yuris yang telah memberikan semangat, perhatian serta dukungan kepada penulis;
10. Teman-teman IESP 2012 yang telah memberikan bantuan, semangat dan menjadi teman baik penulis;
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kata sempurna, sehingga penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga bantuan dari berbagai pihak mendapat balasan dari Allah SWT dan harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Jember, 23 September 2016

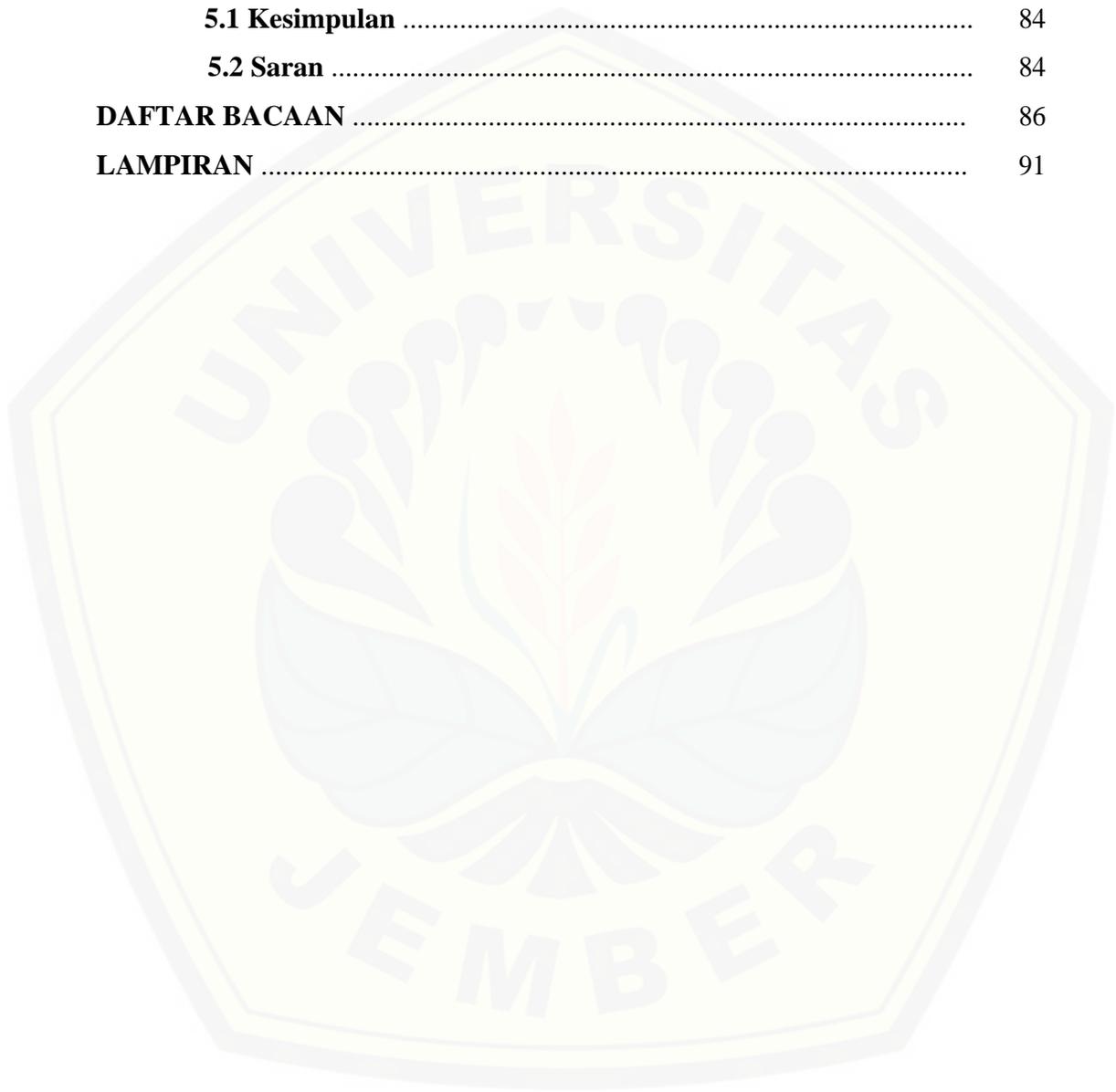
Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING	vi
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
RINGKASAN	xi
PRAKATA	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	12
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Landasan Teori	13
2.1.1 Peran Pemerintah dalam Perekonomian	13

2.1.2 Teori Pembangunan Ekonomi dalam Kebijakan Fiskal	15
2.1.3 Teori Kebijakan Fiskal	18
2.1.4 Penerimaan Pemerintah	22
2.1.5 Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan ..	24
2.1.6 Pengeluaran Pemerintah	25
2.1.7 Teori Pengeluaran Pemerintah	28
2.1.8 Kebijakan Fiskal dalam Proses Pendesakan	31
2.1.9 Teori Pendapatan Nasional	33
2.1.10 Teori Pertumbuhan Ekonomi	36
2.2 Penelitian Sebelumnya	43
2.3 Kerangka Konseptual	46
2.4 Hipotesis Penelitian	44
BAB 3. METODE PENELITIAN	47
3.1 Jenis dan Sumber Data	47
3.2 Spesifikasi Model Penelitian	48
3.3 Metode Analisis Data	49
3.3.1 Metode <i>Ordinary Least Square</i> (OLS)	50
3.3.2 Uji Signifikansi	51
3.3.3 Uji Asumsi Klasik	51
3.4 Definisi Oprasional Variabel	54
BAB 4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN	56
4.1 Gambaran Umum	56
4.1.1 Gambaran Umum Perekonomian Indonesia	56
4.1.2 Peran Kebijakan Fiskal terhadap Fluktuasi Ekonomi	60
4.1.3 Perkembangan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran ...	62
4.2 Hasil Analisis Data	64
4.2.1 Analisis Deskriptif	65
4.2.2 Hasil Estimasi <i>Ordinary Least Square</i> (OLS)	66
4.2.3 Hasil Uji Asumsi Klasik	68
4.3 Pembahasan Hasil Analisis Kebijakan Fiskal	72

4.3.1 Pengaruh Pajak terhadap PDB riil	72
4.3.2 Pengaruh Non Pajak terhadap PDB riil	76
4.3.3 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap PDB riil ...	79
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	84
5.1 Kesimpulan	84
5.2 Saran	84
DAFTAR BACAAN	86
LAMPIRAN	91



DAFTAR TABEL

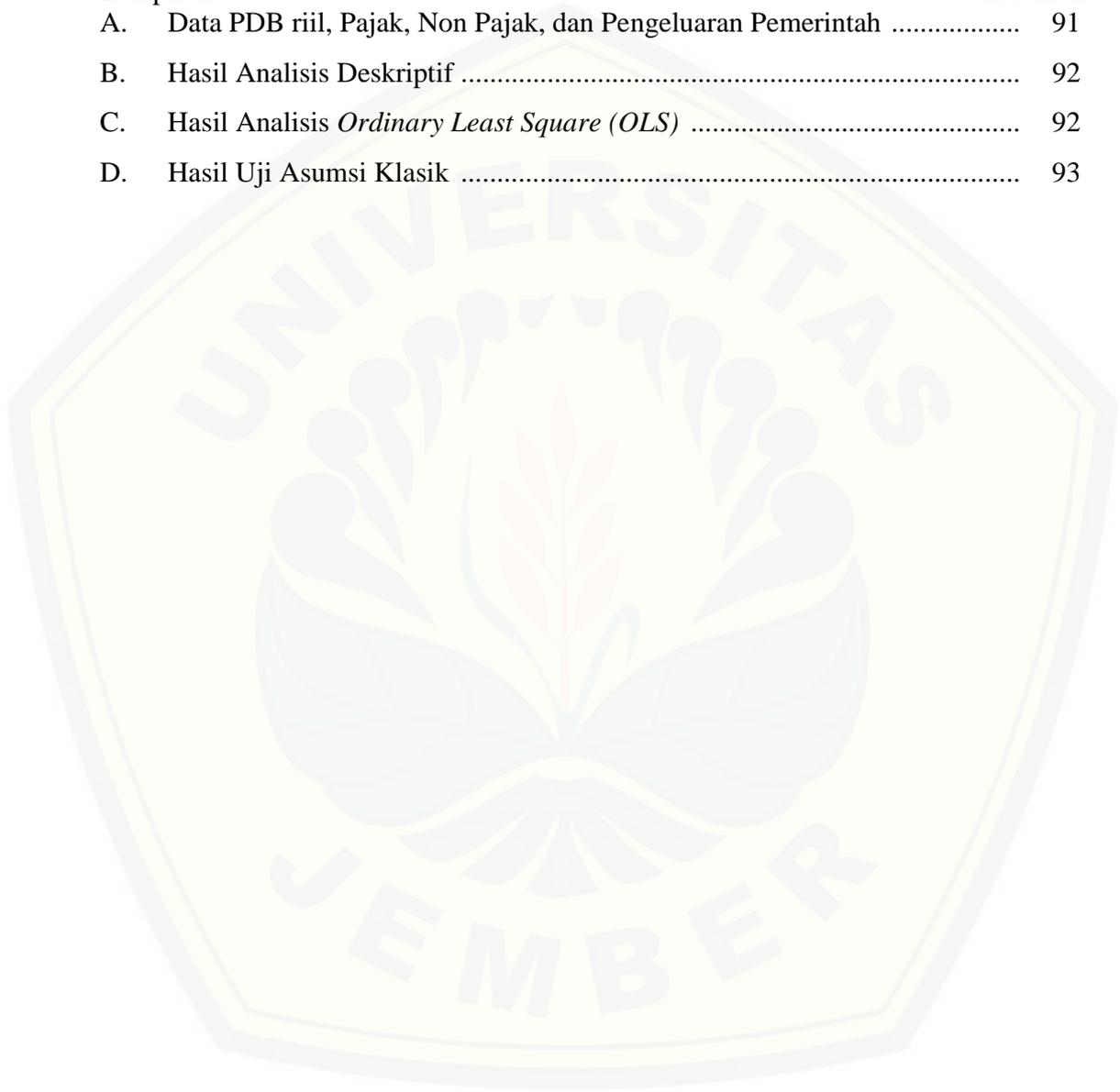
Tabel	Halaman
2.1 Penelitian Sebelumnya	41
4.1 Nilai <i>Mean, Median, Maximum, Minimum</i> , dan <i>Standar Deviasi</i> dari masing-masing variabel	65
4.2 Hasil Estimasi OLS	67
4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik	68
4.4 Hasil Pengujian <i>Ramsey Reset Test</i>	69
4.5 Hasil Uji Multikolinearitas	70
4.6 Hasil Penyembuhan Multikolinearitas dengan <i>First Difference</i>	70
4.7 Hasil Pengujian Durbin-Watson	71
4.9 Hasil Pengujian <i>Heteroskedasticity Test White</i>	71
4.10 Hasil Uji <i>Jarque-Bera</i>	72

DAFTAR GAMBAR

Tabel	Halaman
1.1 Grafik Laju Pertumbuhan Pengangguran, Inflasi dan GDP	5
1.2 Grafik Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah	8
2.1 Kurva Kebijakan Fiskal Keynes dan Klasik	20
2.2 Kurva Rahn	30
2.3 Kurva Proses Pendesakan	32
2.4 Kerangka Konseptual	45
4.1 Grafik Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha ..	59
4.2 Grafik Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah	63
4.3 Grafik Laju Pertumbuhan Pajak dan PDB riil di Indonesia	74
4.4 Grafik Penerimaan, Pengeluaran, dan Defisit Anggaran di Indonesia	81

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
A. Data PDB riil, Pajak, Non Pajak, dan Pengeluaran Pemerintah	91
B. Hasil Analisis Deskriptif	92
C. Hasil Analisis <i>Ordinary Least Square (OLS)</i>	92
D. Hasil Uji Asumsi Klasik	93



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian suatu negara tidak terlepas dari gejolak siklus ekonomi, suatu negara pernah berada pada masa resesi/depresi dan masa pemulihan/*boom* yang dapat bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Siklus ekonomi adalah pola ekspansi (pemulihan) dan kontraksi (resesi) yang kurang lebih teratur dalam kegiatan ekonomi disekitar alur trend laju pertumbuhan. Pada titik puncak, kegiatan ekonomi relatif tinggi terhadap trend, dan pada titik lesu, titik rendah aktivitas ekonomi pun telah dicapai (Dornbusch dan Fischer, 1987:16). Perekonomian yang berada pada masa resesi dapat dicegah dan diatasi salah satunya melalui kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki perekonomian melalui penyesuaian dibidang penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Secara spesifik, tujuan utama kebijakan fiskal adalah tercapainya kesempatan kerja penuh dari stabilitas harga (Rahayu, 2010:3). Stabilitas harga ini menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang tidak naik dan tidak turun terlalu tajam atau dapat dikatakan inflasi yang hampir mendekati nol. Tingkat harga diukur melalui Indeks Harga Konsumen (IHK). Harga barang-barang yang cenderung stabil akan mempengaruhi besarnya pengeluaran masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.

Sebagian besar studi empiris menunjukkan bahwa kebijakan moneter lebih besar pengaruhnya dalam kegiatan ekonomi dibandingkan dengan kebijakan fiskal, sehingga kebijakan fiskal kurang mendapat perhatian. Menurut Rahman (2005) yang melakukan penelitian di Bangladesh memaparkan bahwa hanya kebijakan moneter saja yang positif berdampak signifikan terhadap pertumbuhan output riil di Bangladesh. Sedangkan, dampak kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan output riil di Bangladesh tetap tidak signifikan. Kebijakan moneter relatif lebih efektif daripada kebijakan fiskal dalam mendorong kegiatan ekonomi riil.

Akan tetapi, tidak sedikit pula yang mengatakan kebijakan fiskal efektif dalam menghadapi masa resesi. Hasil penelitian dari Martone (1989) memaparkan bahwa ketika di negara Argentina dan Brazil mengalami “guncangan heterodoks” atau ketidakstabilan perekonomian karena inflasi yang meningkat tajam, pemerintah Argentina dan Brazil menerapkan kebijakan fiskal untuk mengendalikan inflasi dan memulihkan perekonomian pada masa tersebut. Hasilnya menunjukkan pengendalian pada instrumen kebijakan fiskal dari pajak dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif pada perekonomian. Yadirichukwu (2012) di Nigeria dan Moreno, *et al* (2011) dalam penelitiannya juga membuktikan bahwa kebijakan fiskal berfungsi baik dalam menjaga stabilitas perekonomian suatu negara. Penerimaan dan pengeluaran pemerintah terutama dari pajak dan komponen produktif pada pengeluaran pemerintah berpengaruh secara signifikan dan berdampak positif pada tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) riil per kapita. Begitu juga menurut Afonso dan Sousa (2009), yang inti dalam penelitiannya menyatakan bahwa perubahan dalam penerimaan dan pengeluaran pemerintah melalui kebijakan fiskal berpengaruh dalam perekonomian secara makro.

Secara keseluruhan, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter merupakan dua kebijakan stabilisasi makroekonomi yang saling berkaitan dalam mempengaruhi siklus ekonomi. Tujuan utama kebijakan stabilisasi adalah untuk mengendalikan inflasi dan memperbaiki keseimbangan fiskal melalui pengurangan anggaran belanja pemerintah, peningkatan pendapatan pemerintah melalui kenaikan pajak kekayaan dan pajak penghasilan, baik untuk badan usaha atau perorangan, serta mereformasi sistem moneter nasional secara keseluruhan. Selain itu, juga bertujuan untuk menghapus defisit neraca transaksi berjalan melalui pengendalian nilai tukar domestik (devaluasi) dan penggalakan ekspor (Todaro dan Smith, 2003:312).

Perdebatan efektivitas antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal juga dikemukakan oleh dua ekonom yang berbeda pemikiran, yaitu John Maynard Keynes dan Adam Smith. Kebijakan fiskal mulai dikenal ketika John Maynard Keynes mengutarakan pendapatnya, bahwa kebijakan fiskal adalah kebijakan

yang paling efektif dalam mempengaruhi jalannya perekonomian terutama dalam memberantas pengangguran dan meningkatkan output, melalui campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Dari berbagai kebijakan, Keynes lebih sering mengandalkan kebijakan fiskal dalam menjaga stabilitas perekonomian dibandingkan kebijakan lainnya (Deliarnov, 2010:170). Sedangkan dari sisi lain, kaum klasik lebih menekankan kebijakan moneter dalam mengatasi masalah perekonomian. Menurutnya, kebijakan fiskal kurang efektif dalam mengatasi masalah perekonomian karena memiliki efek *crowding out* dalam kebijakan tersebut dan hanya akan meningkatkan suku bunga sehingga mengurangi pengeluaran swasta terutama investasi serta tidak berpengaruh pada pendapatan nasional.

Sejak krisis dunia tahun 1930-an memberikan koreksi bagi ahli ekonomi dan pengambil kebijakan bahwa perekonomian tidak hanya dijaga dari sisi mikronya saja tetapi juga secara makro karena dampaknya yang beruntun. Sejak krisis tersebut hingga beberapa tahun belakangan kebijakan fiskal masih menjadi perbincangan hangat bagi para ekonom dunia. Kebijakan fiskal menjadi harapan fenomena baru ditengah perlambatan ekonomi dan rentannya krisis ekonomi di dunia. Dalam konteks pembangunan, kebijakan fiskal berfungsi baik sebagai alat stabilisasi makroekonomi dan sebagai instrumen untuk mencapai pertumbuhan serta membrantas kemiskinan (*World Bank*, 2006). Setiap kebijakan fiskal didesain untuk mampu meningkatkan pendapatan nasional dan mengendalikan inflasi yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi secara terus menerus merupakan pertanda berhasilnya pembangunan ekonomi di suatu negara. Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah melalui PDB, yang menyatakan pendapatan total dan pengeluaran total nasional atas output barang dan jasa perekonomian. PDB dianggap sebagai ukuran terbaik dari kinerja perekonomian (Mankiw, 2002:16).

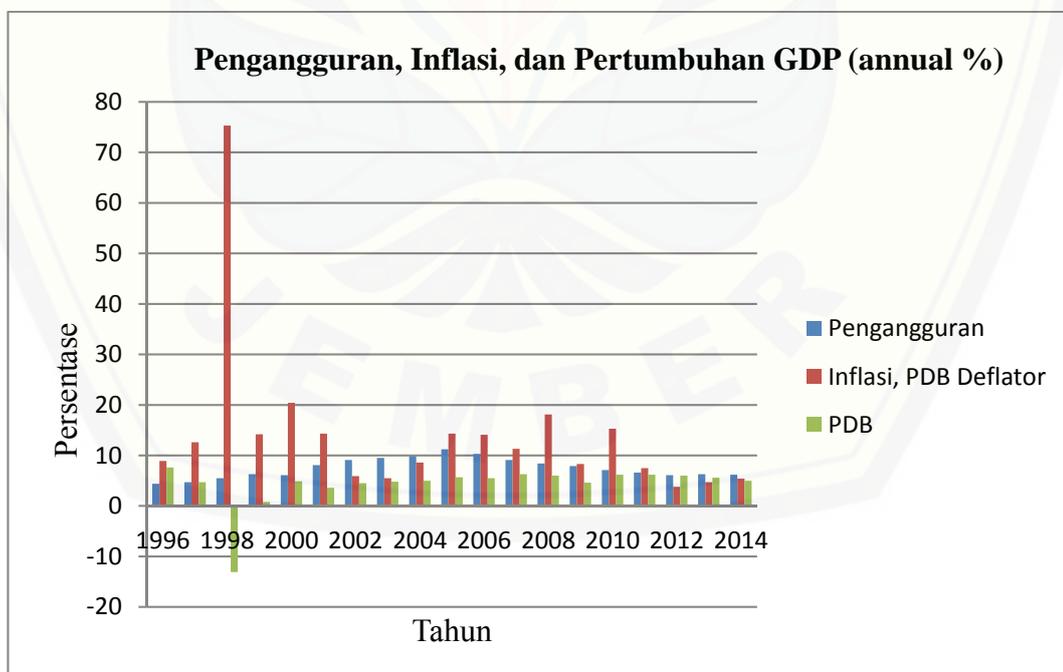
Data dari *World Bank* menunjukkan adanya tren penurunan terhadap pertumbuhan GDP di Indonesia dan meningkatnya inflasi serta pengangguran yang cukup tinggi ketika terjadi krisis moneter tahun 1997/1998 dan krisis global

tahun 2008. Inflasi yang terus meningkat dan diiringi dengan jumlah pengangguran yang tinggi akan memberikan efek buruk bagi perekonomian secara makro karena akan berdampak pada variabel makro lainnya khususnya pertumbuhan ekonomi. Inflasi perlu dikendalikan ke tingkat terendah karena berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dan kelancaran produksi maupun distribusi barang dan jasa. Inflasi yang tinggi akan menurunkan daya beli masyarakat terutama masyarakat yang berpenghasilan relatif tetap. Inflasi juga akan menyebabkan biaya produksi menjadi naik sehingga mengakibatkan harga barang menjadi tinggi.

Data dari *World Bank*, juga menunjukkan adanya peningkatan inflasi dan pengangguran yang cukup besar dari tahun 1996 sampai dengan 1998, dari 8,9 persen di tahun 1996, 12,6 persen pada 1997 hingga mencapai puncak tertinggi sebesar 75,3 persen tahun 1998 serta angka pengangguran meningkat 1,9 persen di tahun 1999. Inflasi yang tinggi di tahun tersebut dikarenakan meningkatnya penawaran agregat yang tidak diimbangi dengan permintaan agregat. Selain itu, juga karena terkena dampak dari krisis ekonomi Asia yang bermula di Thailand. Naik turunnya permintaan agregat dipengaruhi oleh permintaan belanja akan konsumsi dan investasi yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah. Secara garis besar, konsumsi dan investasi masyarakat dapat dikendalikan melalui kebijakan moneter, sedangkan konsumsi dan investasi pemerintah dapat dikendalikan melalui kebijakan fiskal (Kementrian Keuangan, 2013). Inflasi tahunan dan angka pengangguran dari *World Bank* menunjukkan penurunan sebesar 14,2 persen di tahun 1999 dan tingkat pengangguran hanya turun sebesar 0,2 persen di tahun 2000. Akan tetapi, lima tahun setelah tahun 2000 tingkat pengangguran terus meningkat hingga 11,2 persen di tahun 2005. Pada tahun 2000 inflasi juga meningkat sebesar 20,4 persen. Peningkatan ini menjadi peningkatan tertinggi kedua setelah krisis moneter. Tahun 2006 sampai tahun 2014 tingkat pengangguran mulai menunjukkan penurunan secara terus menerus dari tahun ke tahun. Penurunan pengangguran ini akan berpengaruh positif pada perekonomian Indonesia karena semakin banyak tenaga kerja yang terserap.

Inflasi dan pengangguran merupakan indikator utama yang mempengaruhi pendapatan nasional.

Sepanjang sejarah penurunan PDB terendah terjadi di tahun 1998 hingga -13,1 persen. Minusnya PDB mengakibatkan kegiatan perekonomian menjadi macet. Pada tahun 1999 PDB mulai menunjukkan sedikit peningkatan sebesar 0,8 persen dan di tahun 2000 PDB mulai menunjukkan perbaikan sebesar 4,9 persen meskipun pada saat itu inflasi juga meningkat. Beberapa tahun setelah itu, laju inflasi dan PDB berfluktuasi. Memasuki tahun 2008, perekonomian dunia melambat kembali akibat krisis global di Amerika Serikat. Meskipun tidak terkena pengaruh yang kuat, Indonesia juga menunjukkan tren penurunan PDB dan peningkatan inflasi pada tahun 2008 dibanding tahun sebelumnya., yaitu sebesar 0,3 persen dan 7,2 persen. Setelah mengalami perlambatan ekonomi, perekonomian dunia mulai menunjukkan masa pemulihan pasca krisis global 2008. Pertumbuhan PDB menjadi 6,2 persen di tahun 2010 dan 2011. Akan tetapi, di tahun 2012 hingga 2014 laju pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan kembali yaitu dari 6 persen menjadi 5,6 persen hingga 5 persen.



Gambar 1.1 Grafik laju pertumbuhan pengangguran, inflasi dan GDP.

Sumber: *World Bank*, diolah.

Menurut laporan tahunan Bank Indonesia (BI) bulan Desember 2015, inflasi tahun 2015 diperkirakan cukup rendah dan berada di bawah 3 persen. Inflasi yang rendah tersebut didukung oleh tiga komponen yaitu: (i) inflasi *volatile food* yang cukup rendah karena didorong oleh kecukupan bahan pangan; (ii) *administered prices* yang mengalami deflasi, seiring dengan menurunnya harga energi dunia di tengah reformasi subsidi; dan (iii) inflasi inti tetap terkendali di dukung oleh ekspektasi yang terjaga, dampak *passthrough* pelemahan nilai tukar yang terbatas dan tekanan permintaan yang relatif lemah. Terjaganya inflasi inti ini juga tidak terlepas dari peran kebijakan BI dalam mengelola permintaan domestik, menjaga stabilitas nilai tukar, dan mengarahkan ekspektasi inflasi. Inflasi di tahun 2016 diperkirakan berada pada sasaran 4 ± 1 persen. Namun, risiko inflasi perlu terus diwaspadai, terutama terkait penyesuaian anggaran pemerintah, sehingga diperlukan koordinasi kebijakan BI dan pemerintah dalam mengendalikan inflasi.

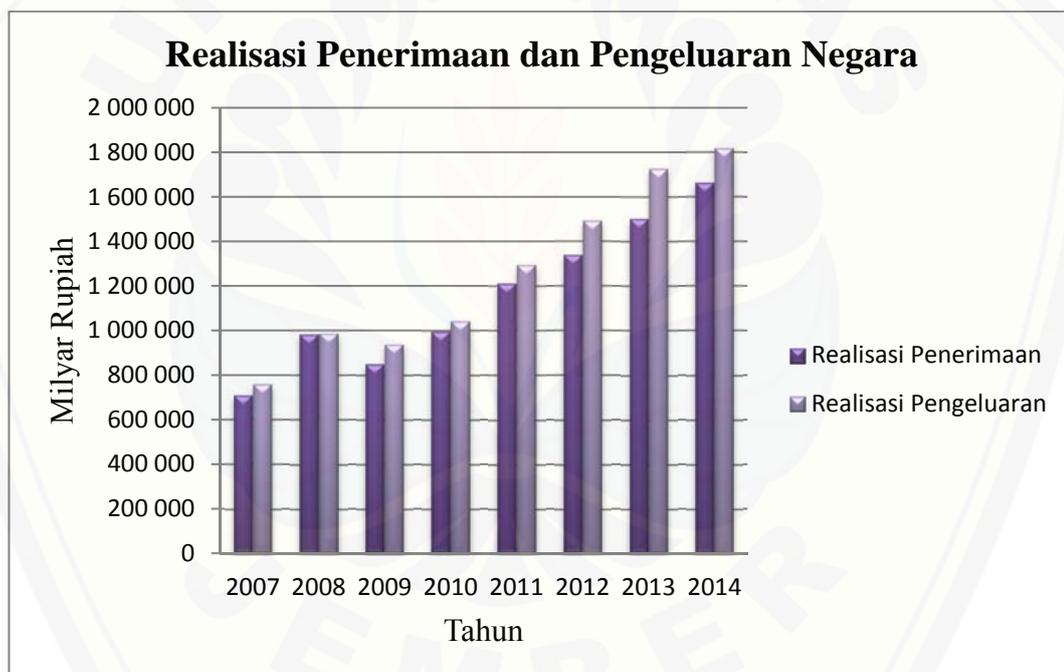
Perkembangan perekonomian Indonesia tidak terlepas dari perkembangan ekonomi secara global. Menurut laporan tahunan BI, selama kurun waktu 2015 pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung melambat karena perekonomian dunia yang melambat. Hal ini dipengaruhi oleh pemulihan ekonomi negara maju yang belum kuat dan pertumbuhan ekonomi negara berkembang yang cenderung menurun. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 4,8 persen (yoy), lebih rendah dari 5,0 persen (yoy) pada tahun 2014. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh ekspor yang menurun seiring lemahnya permintaan global dan penurunan harga komoditas. Hal ini terkonfirmasi dari sisi regional yang menunjukkan perlambatan ekonomi terutama dialami daerah yang berbasis sumber daya alam. Sejalan ekspor yang masih lemah, pertumbuhan investasi relatif terbatas. Investasi bangunan tumbuh meningkat ditopang oleh realisasi proyek-proyek infrastruktur pemerintah, sementara investasi nonbangunan masih terbatas. Namun, pertumbuhan ekonomi masih dapat ditopang oleh konsumsi yang masih cukup kuat, baik rumah tangga maupun pemerintah. Pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan meningkat pada kisaran 5,2 persen -5,6 persen. Pertumbuhan tersebut didorong oleh stimulus fiskal terutama untuk pembangunan proyek infrastruktur dan konsumsi yang diperkirakan masih tetap

rendah. Sementara itu, investasi diharapkan meningkat seiring dengan implementasi paket kebijakan pemerintah yang mendorong investasi dan stabilitas makroekonomi yang semakin baik. Di tengah dinamika ekonomi global, upaya pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan efektivitas stimulus fiskal akan memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2016 (Bank Indonesia, 2015).

Perlambatan ekonomi pada hampir setiap negara memerlukan suatu stimulus fiskal yang mampu meningkatkan PDB melalui perbaikan dalam sistem penerimaan pemerintah dan pengalokasian pengeluaran pemerintah secara efektif dan efisien untuk kesejahteraan masyarakat. Upaya yang dilakukan pemerintah melalui kebijakan fiskal yaitu dengan mengintensifkan penerimaan negara dan diikuti dengan pengeluaran negara yang seefisien mungkin. Dalam menstabilkan perekonomian, kebijakan fiskal yang *countercyclical* memainkan tingkat pajak dan pengeluaran pemerintah. Sesuai dengan teori Keynes, menurutnya ketika terjadi resesi, pemerintah sebaiknya menerapkan kebijakan fiskal ekspansif, dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah dan menurunkan pajak. Begitu juga sebaliknya, saat perekonomian mengalami masa *boom*. Namun, Alesina dan Tabelini (2005) serta *World Bank* (2013) mengindikasikan bahwa tidak semua kebijakan fiskal bersifat *countercyclical*. Pada sebagian besar negara berkembang, kebijakan fiskal cenderung bersifat *procyclical* dimana akan menurunkan pengeluaran pemerintah dan menaikkan pajak ketika terjadi resesi. Hal ini sesuai dengan teori siklus bisnis. Pada teori siklus bisnis, ada dua mekanisme kebijakan dalam mengantisipasi siklus bisnis, yaitu kebijakan *countercyclical* dan *procyclical*. Kebijakan *countercyclical* merupakan kebijakan yang melawan arus siklus bisnis. Artinya, pada saat resesi pemerintah menerapkan kebijakan ekspansif berupa pelonggaran fiskal dan moneter. Sebaliknya, kebijakan *procyclical* merupakan kebijakan yang mengikuti arus siklus bisnis. Hal ini berarti, pada saat resesi, pemerintah menerapkan kebijakan kontraksioner, berupa pengetatan fiskal dan moneter. (Kaminsky, Reinhart & Vegh, 2004 dalam Alim, 2014). Ini berarti bahwa penerapan kebijakan fiskal berbeda-beda hasilnya di

setiap negara dan kebijakan fiskal tidak selalu berdampak baik bagi perekonomian suatu negara.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar. Pada tingkat ekonomi makro, pajak digunakan untuk mendistribusikan pendapatan dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Pajak bekerja melalui permintaan agregat dan penawaran agregat. Pada sisi permintaan agregat, pajak dapat menurunkan daya beli masyarakat. Akan tetapi, hal ini hanya berlaku pada perubahan pajak yang permanen. Kebijakan pajak yang cenderung berubah-ubah akan berdampak kecil terhadap permintaan agregat. Pada akhirnya, pengurangan pajak akan berdampak pada bergesernya kurva permintaan agregat ke kanan dan meningkatkan penawaran agregat pada jangka panjang (Dillingham, Skaggs, dan Carlson, 1992).



Gambar 1.2 Grafik realisasi penerimaan dan pengeluaran pemerintah

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah.

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki kecenderungan kebijakan fiskal yang *procyclical* dan *automatic stabilizer*. Selama kurun waktu 8 tahun terakhir, data realisasi penerimaan dan pengeluaran negara dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan peningkatan di setiap tahunnya. Hanya di tahun 2009 menunjukkan penurunan baik penerimaan maupun pengeluarannya yaitu sebesar

848,763 dan 937,832 milyar rupiah. Pengeluaran yang lebih besar dari penerimaan tersebut diakibatkan terkena dampak akibat krisis global yang menyebabkan perekonomian dunia mengalami perlambatan. Penerimaan yang meningkat di tahun 2008 dan menurun di tahun 2009, ini mengindikasikan ketidaksuaian dengan kebijakan fiskal yang *countercyclical*. Pengeluaran negara yang lebih besar dari penerimaannya mengakibatkan Indonesia sering mengalami defisit anggaran yang menyebabkan pemerintah melakukan pinjaman ke luar negeri. Oleh karena itu, setiap upaya stabilisasi sebaiknya harus sama-sama menitikberatkan pada sisi penerimaan dan pengeluaran. Sisi penerimaan bertumpu pada sumber-sumber mobilisasi dana yang dipergunakan untuk membiayai pos-pos pengeluaran yang esensial (Todaro dan Smith, 2003:313).

Setelah krisis global 2008, pemerintah Indonesia cenderung meningkatkan intensitas kebijakan fiskal di Indonesia untuk mendorong pendapatan nasional Indonesia. Berbagai paket stimulus fiskal telah dijalankan untuk mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan PDB, baik melalui pemotongan pajak perusahaan, keringanan pajak perdagangan, kemudahan layanan investasi, dan lain sebagainya.

Berdasarkan beberapa teori dan penelitian diatas, memberikan kesimpulan bahwa tidak semua kebijakan fiskal dapat bersifat *countercyclical* melainkan ada yang bersifat *procyclical* karena hasil penerapan kebijakan fiskal di setiap negara cenderung berbeda-beda. Kebijakan fiskal berpengaruh langsung pada permintaan dan penawaran agregat. Ketika perekonomian mengalami masa resesi bahkan depresi sangat sesuai menerapkan kebijakan permintaan agregat yang bersifat ekspansif, dan sebaliknya. Terjadinya resesi akan menurunkan permintaan agregat khususnya konsumsi dan investasi sehingga akan menghambat proses produksi yang akan berdampak pada meningkatnya angka pengangguran. Aktivitas ekonomi dapat dikendalikan melalui instrumen fiskal karena instrumen tersebut akan mempengaruhi alokasi faktor-faktor produksi sehingga dapat mempengaruhi pendapatan, stabilitas harga yang akan menahan laju inflasi ataupun deflasi, kesempatan kerja dan mencapai pertumbuhan PDB yang diinginkan.

Menurut Samuelson (1985), belanja pemerintah akan berpengaruh pada konsumsi total dan penerimaan agregat sedangkan penerimaan perpajakan mengurangi pendapatan, mengurangi penerimaan modal dan output potensial. Begitu juga menurut Keynes, yang meyakini bahwa melalui pengaturan pada instrumen fiskal akan mempengaruhi tingkat harga barang dan jasa karena akan mempengaruhi permintaan agregat yang dapat mengubah keseimbangan harga pasar. Dengan demikian, pengaturan kebijakan fiskal akan berdampak pada inflasi dan pertumbuhan PDB. Berdasarkan data dari *World Bank* dan BPS, menunjukkan bahwa penerimaan dan pengeluaran pemerintah selalu meningkat setiap tahunnya. Akan tetapi, pengeluaran pemerintah selalu melebihi penerimaannya sehingga terjadi defisit anggaran yang meningkat dari tahun ke tahun. Defisit anggaran akan mempengaruhi kelancaran kegiatan ekonomi pada pasar barang dan jasa serta pasar uang. Kedua pasar tersebut akan berpengaruh pada besarnya permintaan agregat yang juga akan mempengaruhi besarnya inflasi karena defisit anggaran akan menimbulkan ekspansi moneter yang akan meningkatkan jumlah uang yang beredar terutama defisit anggaran yang dibiayai dengan utang luar negeri. Sedangkan pemerintah Indonesia membiayai defisit anggaran melalui utang luar negeri. Hal inilah yang menyebabkan pertumbuhan PDB Indonesia cenderung moderat dan tidak mencapai peningkatan yang signifikan.

Pada kurva Rahn juga menjelaskan bahwa apabila pengeluaran pemerintah melebihi titik maksimal yang tidak sebanding dengan penerimaannya, maka akan terjadi penurunan pada PDB riil pada negara tersebut. Hasil penelitian dari Kunarjo (2001) juga membuktikan bahwa defisit anggaran yang semakin besar akan berdampak buruk pada pertumbuhan PDB di negara tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini ingin mengkaji lebih lanjut terhadap perekonomian Indonesia melalui komponen kebijakan fiskal di Indonesia. Apakah melalui kebijakan penerimaan dan pengeluaran pemerintah berdampak terhadap pendapatan nasional (PDB riil) di Indonesia dengan menggunakan data tahunan dari tahun 1984 hingga tahun 2015.

1.2 Rumusan Masalah

Pendapatan nasional yang tinggi merupakan tujuan utama pemerintah di setiap negara. Tujuan ini dapat dicapai salah satunya dengan kebijakan fiskal melalui penyesuaian di bidang penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Data pada latar belakang, menunjukkan bahwa penerimaan negara baik dari pajak maupun bukan pajak dan pengeluaran pemerintah secara keseluruhan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Akan tetapi, pengeluaran pemerintah selalu melebihi penerimaannya sehingga defisit anggaran di Indonesia terjadi dari tahun ke tahun. Defisit anggaran dapat menimbulkan inflasi dan menurunkan PDB riil Indonesia, karena defisit anggaran di Indonesia dibiayai dengan utang luar negeri. Defisit anggaran yang dibiayai dengan utang luar negeri akan meningkatkan jumlah uang yang beredar dan menimbulkan inflasi, sedangkan inflasi menyebabkan PDB riil menurun. Hal inilah yang menyebabkan PDB riil Indonesia cenderung moderat dan tidak mencapai peningkatan yang signifikan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka rumusan masalah yang akan dijelaskan pada penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar pengaruh penerimaan negara dari pajak terhadap PDB riil di Indonesia selama tahun 1984 sampai dengan tahun 2015?
2. Seberapa besar pengaruh penerimaan negara bukan pajak terhadap PDB riil di Indonesia selama tahun 1984 sampai dengan tahun 2015?
3. Seberapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap PDB riil di Indonesia selama tahun 1984 sampai dengan tahun 2015?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan tentang pengaruh komposisi struktur penerimaan negara dari pajak terhadap PDB riil di Indonesia selama periode penelitian;
2. Menjelaskan tentang pengaruh komposisi struktur penerimaan negara bukan pajak terhadap PDB riil di Indonesia selama periode penelitian; dan

3. Menjelaskan tentang pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap PDB riil di Indonesia selama periode penelitian.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Guna memahami dan mendalami masalah-masalah dibidang ilmu ekonomi khususnya yang berkaitan dengan kebijakan fiskal dan pendapatan nasional di Indonesia;
2. Sebagai latihan dan pembelajaran dalam menerapkan teori yang diperoleh sehingga menambah pengetahuan, pengalaman, dan dokumentasi ilmiah; serta
3. Sebagai bahan pertimbangan dan dasar referensi bagi penelitian selanjutnya yang sejenis.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab 2 bagian pertama akan dipaparkan secara rinci mengenai landasan teori yang mendukung tentang teori-teori dan konsep kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, seperti peran pemerintah dalam perekonomian, teori kebijakan fiskal, teori penerimaan dan pengeluaran pemerintah, dan teori pertumbuhan ekonomi. Pada sub bab 2.2 juga diuraikan mengenai penelitian sebelumnya sebagai acuan dan landasan empiris yang sebangun dengan penelitian ini serta pada sub bab 2.3 akan diberikan gambaran secara rinci mengenai kerangka berpikir peneliti dalam penelitian saat ini.

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Peranan Pemerintah dalam Perekonomian

Pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian di setiap negara, meskipun besarnya peranan tersebut berbeda-beda di setiap aktivitas ekonomi. Besar kecilnya peranan pemerintah dalam perekonomian tersebut dikemukakan oleh dua ekonom yang memiliki pandangan berbeda, yaitu Klasik dan Keynes.

Adam Smith merupakan tokoh utama kaum klasik yang sangat mendukung motto *laissez faire-laissez passer* (pasar bebas) menghendaki campur tangan pemerintah seminimal mungkin dalam perekonomian. Menurutnya, jika terlalu banyak campur tangan pemerintah, pasar justru akan mengalami distorsi yang akan membawa perekonomian pada ketidakefisienan dan ketidakseimbangan (Deliarnov, 2010:32). Pemerintah diperbolehkan ikut campur tangan dalam perekonomian dalam hal-hal tertentu yang berkaitan dengan bidang pertahanan/keamanan, bidang peradilan, dan bidang pekerjaan umum yaitu negara menyediakan barang-barang yang tidak dihasilkan oleh swasta, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan lain-lain. Pendapat ini didukung oleh David Ricardo, John Stuart Mill, dan tokoh kapitalis lainnya.

Sejak terjadi Depresi tahun 1930-an memberikan koreksi bagi teori-teori kaum klasik yang dianggap berlaku umum selama ini, karena ketika depresi tersebut terjadi kaum klasik tidak dapat menjelaskan alasannya. Menurut Keynes, penyebab krisis tersebut karena kaum klasik menghendaki pasar bebas dan pendapat Jean Baptise Say yang mengatakan penawaran akan selalu berhasil menciptakan permintaannya sendiri. Oleh karena itu, menurut Keynes campur tangan pemerintah dalam perekonomian sangat diperlukan. Adanya pasar bebas hanya akan mensejahterakan masyarakat yang berpendapatan tinggi dan merugikan masyarakat berpendapatan rendah sehingga tidak mampu mengalokasikan sumberdaya dan output secara optimal. Menurut Richard A. Musgrave, peran pemerintah dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Bidang alokasi, maksudnya untuk mengalokasikan sumberdaya yang ada secara optimal, pemerintah memanfaatkan semua yang dimiliki masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan cara yang sebaik-baiknya (efisien) sehingga terhindar dari pemborosan dan pengangguran;
2. Bidang distribusi pendapatan, maksudnya untuk memperkecil perbedaan pendapatan antar golongan dan antar daerah, meratakan hasil pembangunan, dan menciptakan lapangan kerja; dan
3. Bidang stabilisasi, maksudnya melalui kebijakan anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk mempertahankan tingkat kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dengan memperhitungkan segala akibatnya terhadap perdagangan dan neraca pembayaran, serta mestabilkan perekonomian.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, secara umum peran pemerintah sangat diperlukan dalam perekonomian terutama dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Alasannya karena adanya barang bersama, adanya barang publik, adanya unsur ketidaksempurnaan pasar, adanya eksternalitas, adanya depresi ekonomi tahun 1930, adanya unsur ketidakpastian, dan adanya pengangguran. Sebagian besar dari alasan tersebut tidak dapat dihasilkan oleh sektor swasta. Pemerintah dan sektor swasta saling berinteraksi

dalam aktivitas ekonomi. Dengan demikian, sistem perekonomian tidak dapat ditinjau dari sisi ekonomi pemerintah atau swasta saja, melainkan gabungan dari kedua sektor tersebut.

1.1.2 Teori Pembangunan Ekonomi dalam Kebijakan Fiskal

Pembangunan ekonomi diartikan sebagai serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonominya sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia, perusahaan semakin banyak dan semakin berkembang, taraf pendidikan semakin tinggi dan teknologi semakin meningkat. Sebagai implikasi dari perkembangan ini diharapkan kesempatan kerja akan bertambah, pendapatan meningkat, dan kemakmuran masyarakat semakin tinggi (Sukirno, 2006:3-9). Setelah terjadinya krisis keuangan global, berbagai negara lebih memfokuskan kembali tujuan dalam kebijakan fiskal sebagai instrumen untuk pertumbuhan dan perkembangan, serta menekankan keberlanjutan fiskal untuk stabilitas ekonomi makro (IMF, 2013). Pada jangka panjang, salah satu potensi pendapatan yang tersedia bagi pemerintah untuk membiayai segala usaha pembangunan adalah penggalakan pajak. Selain itu, sebagai akibat ketiadaan pasar-pasar uang domestik yang terorganisir dan terkontrol dengan baik, sebagian besar pemerintah negara-negara Dunia Ketiga atau negara berkembang harus mengandalkan langkah-langkah fiskal dalam rangka mengupayakan stabilisasi perekonomian nasional dan memobilisasikan sumber-sumber daya (keuangan) domestiknya (Todaro dan Smith, 2006:337).

Berdasarkan konteks pembangunan, kebijakan fiskal berfungsi baik sebagai alat stabilisasi makroekonomi dan sebagai instrumen untuk mencapai pertumbuhan dan membrantas kemiskinan (*World Bank*, 2006). Meskipun beberapa usaha telah dirancang dan dilaksanakan untuk menaikkan pendapatan pemerintah, sebagian besar negara-negara berkembang masih menghadapi masalah ketidakcukupan tabungan dibandingkan dengan keperluan dana untuk membiayai proyek-proyek. Kekurangan dana ini biasanya diatasi dengan meminta bantuan luar negeri atau melakukan anggaran belanja defisit untuk menutupi kekurangan biaya pembangunan. Pembiayaan anggaran belanja defisit ini berasal

dari beberapa sumber, yaitu: (i) meminjam dari masyarakat, lembaga-lembaga keuangan di luar bank komersial (bank tabungan, perusahaan asuransi, pasar modal, dan sebagainya), bank komersial dan bank sentral; serta (ii) mencetak uang. Memperbesar dana untuk pembangunan dengan meminjam dari bank-bank komersial dan Bank Sentral atau mencetak uang dapat menimbulkan inflasi. Oleh sebab itu, pengalihan dana pembangunan yang demikian dinamakan sebagai tabungan paksa. Meminjam dari masyarakat dan badan-badan keuangan di luar bank komersial tidak akan menimbulkan inflasi karena pinjaman tersebut diperoleh dari tabungan masyarakat dan tidak menciptakan daya beli (Sukirno, 2006:316).

Pada umumnya, negara berkembang enggan menjalankan pembangunan yang dibiayai dengan cara pembiayaan defisit karena negara berkembang mempunyai tekad untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang cepat tanpa inflasi. Kebijakan pembangunan ini didasarkan pada keyakinan bahwa inflasi tidak hanya menimbulkan akibat buruk kepada masyarakat, tetapi juga menghambat pertumbuhan pembangunan. Namun, ada beberapa negara yang tidak berusaha menghindari masalah inflasi dalam membangun perekonomian mereka karena menurutnya inflasi adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan dalam proses pembangunan. Pertentangan pendapat mengenai peranan inflasi dalam pembangunan ekonomi dikemukakan oleh golongan monetaris dan strukturalis, sebagai berikut (Sukirno, 2006:319-321):

1. Pandangan Golongan Monetaris

Golongan monetaris menganggap inflasi disebabkan oleh kelebihan dalam penawaran uang dan permintaan agregat masyarakat. Pandangan ini sejalan dengan teori konvensional, yaitu apabila permintaan terus bertambah, sedangkan kapasitas untuk memproduksi barang-barang telah mencapai tingkat maksimal berarti penawaran tidak dapat ditambah lagi sehingga terjadi inflasi. Menurut golongan monetaris inflasi yang memiliki sifat demikian yang terjadi di negara berkembang. Keinginan untuk mempercepat laju pembangunan telah mendorong negara berkembang untuk melaksanakan ekspansi moneter yang berlebihan terutama ditujukan untuk membiayai

anggaran belanja pemerintah dan menyediakan lebih banyak pinjaman kepada masyarakat akibatnya inflasi akan timbul.

Golongan monetaris tidak menyetujui kebijakan yang demikian dilaksanakan dan menyarankan kebijakan mempercepat pembangunan sebaiknya dilaksanakan dengan menyalurkan tabungan yang ada dalam masyarakat dan badan-badan keuangan kepada pemerintah dan pengusaha. Menurutnya, pemerintah harus berusaha agar kebijakan defisit anggaran belanjanya tidak dibiayai dengan mencetak uang atau meminjam kepada sistem bank. Sebaliknya, untuk membiayai pembangunan yang harus dilaksanakan adalah menaikkan tabungan pemerintah dengan mengadakan perombakan pada sistem perpajakan. Selain itu, bank-bank komersial harus diawasi agar tidak menjalankan pinjaman yang berlebihan, dengan menjalankan kebijakan tersebut pembangunan ekonomi dapat mencapai sasaran tanpa disertai inflasi.

2. Pandangan Golongan Strukturalis

Golongan strukturalis berpendapat bahwa inflasi di negara berkembang disebabkan oleh kelemahan dalam struktur ekonomi. Menurutnya, walaupun dalam masyarakat tidak terjadi ekspansi moneter, inflasi dapat juga terjadi. Hal ini bersumber dari ketidakmampuan sektor-sektor produktif untuk mengembangkan produksi dengan cepat dan sesuai dengan yang diperlukan oleh perubahan-perubahan dalam permintaan, seperti sektor pertanian. Penduduk yang terus bertambah dan perpindahan penduduk dari daerah pertanian ke kota-kota untuk bekerja di sektor industri, akan menaikkan permintaan untuk bahan makanan. Rendahnya tingkat produktivitas dan beberapa faktor lain yang menghambat perkembangan sektor pertanian, tidak memungkinkan sektor tersebut untuk memenuhi permintaan yang bertambah sehingga harga-harga naik dan menimbulkan tuntutan untuk kenaikan tingkat upah di sektor industri, serta menaikkan biaya produksi. Sektor lain yang dapat menimbulkan inflasi yaitu sektor ekspor.

Berdasarkan beberapa kemungkinan timbulnya inflasi tersebut, golongan strukturalis berpendapat bahwa sumber inflasi bukanlah sebagai akibat dari ekspansi moneter, melainkan karena pada umumnya perekonomian negara

berkembang tidak sanggup memenuhi tambahan permintaan yang berlaku sebagai kibat dari pembangunan ekonomi. Dalam menghadapi masalah inflasi seperti itu, golongan strukturalis tidak setuju dengan golongan monetaris, yaitu pemerintah harus mengekang diri dari penerapan ekspansi moneter melalui defisit anggaran belanja dan kebijakan moneter yang longgar. Golongan strukturalis berpendapat bahwa kebijakan yang diusulkan golongan Monetaris tidak dapat menciptakan dana yang diperlukan untuk meningkatkan penanaman modal sehingga akan menghambat laju pembangunan dan memperburuk masalah pengangguran. Apabila inflasi yang disebabkan oleh kelemahan struktur ekonomi negara berkembang harus diperangi dan dikekang, pemerintah harus berusaha menghapuskan defisit dalam anggaran belanjanya, dan ini akan mengurangi kemampuan pemerintah untuk melaksanakan proyek pembangunan. Demikian juga, apabila kebijakan moneter harus diperketat, para pengusaha akan menghadapi kesulitan untuk memperoleh dana untuk membiayai kegiatan memproduksi dan penanaman modal.

2.1.2 Teori Kebijakan Fiskal

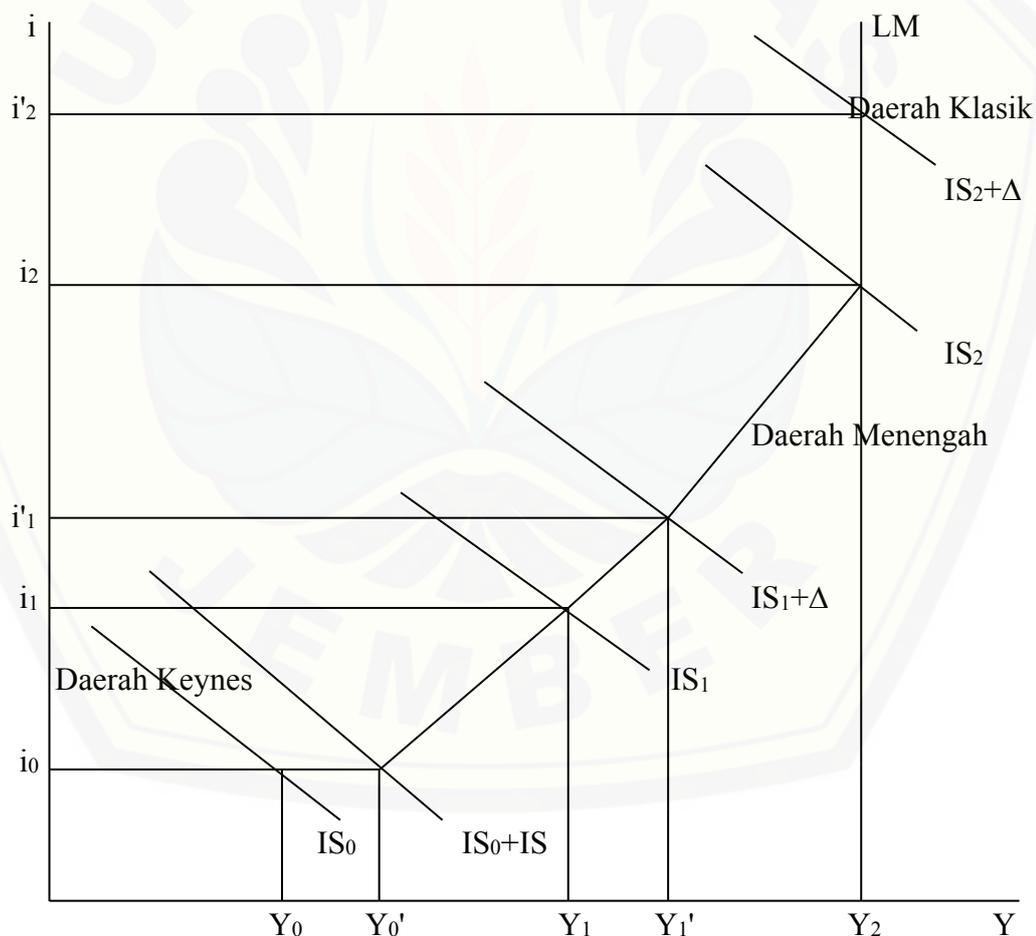
Kebijakan fiskal (*fiscal policy*) adalah kontrol yang disengaja dari belanja pemerintah, pembayaran transfer, pajak, dan pinjaman dalam rangka untuk mempengaruhi variabel ekonomi makro seperti tenaga kerja, tingkat harga, dan tingkat PDB (Robinson, *et al*, 1991:245). Pada tingkat harga tertentu, kenaikan belanja pemerintah atau transfer akan menaikkan jumlah PDB riil yang diminta, dan kenaikan pajak menurunkan jumlah PDB riil yang diminta, hal lain diasumsikan konstan (McEachern, 2000:236). Alat kebijakan fiskal dapat dibagi menjadi dua kategori utama yaitu stabilisator otomatis dan kebijakan fiskal diskresioner. Stabilisator otomatis adalah pos pendapatan dan belanja dalam anggaran belanja pemerintah yang berubah secara otomatis dengan meningkatnya ataupun menurunnya kondisi perekonomian, sehingga menstabilkan *disposable income*, konsumsi dan pendapatan nasional riil (McEachern, 2000:236). Sedangkan kebijakan fiskal diskresioner atau kebijakan fiskal aktif adalah

kebijakan yang dilakukan pemerintah melalui perubahan pengeluaran pemerintah dan pajak yang akan mempengaruhi tingkat pendapatan dan dapat bersifat ekspansif maupun kontraktif (Dornbusch dan Fischer, 1987:32).

Kebijakan fiskal ekspansif adalah suatu kebijakan dengan cara menaikkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak netto dengan tujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan menaikkan output, kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami resesi/depresi serta saat pengangguran meningkat. Sedangkan kebijakan fiskal kontraktif adalah suatu kebijakan dengan cara menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak dengan tujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi, serta agar kembali ke penggunaan tenaga kerja penuh (Rahayu, 2010:6-7). Kebijakan fiskal ekspansi dapat menutup kesenjangan kontraksi dengan meningkatkan belanja pemerintah atau dengan menurunkan pajak netto. Karena *slope* kurva penawaran jangka pendek menaik, meningkatnya permintaan agregat akan meningkatkan baik output dan tingkat harga dalam jangka pendek. Kebijakan fiskal yang ditujukan untuk menurunkan permintaan agregat dalam rangka menutup kesenjangan ekspansi akan menurunkan output dan tingkat harga (McEachern, 2000:251). Tujuan kebijakan fiskal cenderung berbeda antara negara maju dengan negara berkembang. Di negara-negara maju peranan kebijakan fiskal umumnya untuk mempertahankan *full employment* dan menstabilkan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, di negara-negara berkembang kebijakan fiskal digunakan untuk menciptakan suatu lingkungan yang baik bagi pertumbuhan ekonomi yang cepat (Sutawijaya dan Lestari, 2013:68). Kebijakan fiskal akan efektif apabila terdapat kemiringan absolut skedul kurva IS yang besar dan suatu kemiringan absolut untuk skedul LM yang kecil (Diulio, 1994:161).

Pada saat perekonomian mengalami masa resesi (kelesuan) perekonomian banyak dipertentangkan, apakah menjalankan kebijakan fiskal atau kebijakan moneter. Keynes dan para pendukungnya lebih menyukai penggunaan kebijakan fiskal daripada kebijakan moneter, sedangkan kaum Klasik sebaliknya. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter pada dasarnya, yaitu bagaimana mempengaruhi atau mendorong permintaan agregat melalui penawaran uang (penambahan jumlah

uang beredar), karena kedua kebijakan ini tidak bisa langsung mempengaruhi permintaan agregat, tanpa melalui penambahan jumlah uang beredar. Meningkatkan permintaan agregat melalui kebijakan fiskal dengan cara menambah pengeluaran pemerintah yang dibiayai dari penambahan pajak yang sama besar. Penambahan ini dibiayai melalui penerimaan negara bukan pajak, seperti pinjaman pemerintah dan sebagainya. Sedangkan pada kebijakan moneter, menaikkan dan meningkatkan suku bunga adalah cara yang dapat mempengaruhi permintaan agregat. Apabila suku bunga turun, jumlah uang beredar akan bertambah terutama untuk spekulasi sehingga investasi akan meningkatkan permintaan melalui *multiplier effect*. Berikut model analisis kebijakan fiskal menurut Keynes dan Klasik (Nasution, 1997:189-199):



Gambar 2.1 Kurva kebijakan fiskal keynes dan klasik

1. Pada *Keynesian Range* (Kawasan Keynes)

Bertambahnya pengeluaran pemerintah mengakibatkan peningkatan pendapatan sebesar $Y_0 - Y_0'$, merupakan jumlah yang sama besarnya dengan angka pengganda penuh dikali pertambahan pengeluaran pemerintah. Pertambahan pendapatan sebesar ini akan terjadi apabila diasumsikan pertambahan pengeluaran pemerintah ini tidak dibiayai dari pajak, dan jumlah uang beredar sudah tetap jumlahnya. Pertambahan pengeluaran tersebut dibiayai dari pinjaman pemerintah pada masyarakat berupa penjualan obligasi, sehingga pertambahan pengeluaran pemerintah tidak menaikkan uang beredar, tidak menaikkan suku bunga, dan tidak meningkatkan investasi. Oleh karena itu, *multiplier effect* dapat bekerja sepenuhnya dan menyebabkan peningkatan pendapatan sebesar perkalian *multiplier* penuh dengan pertambahan pengeluaran pemerintah.

2. Kawasan *Intermediate Range* (Daerah Menengah)

Pertambahan pengeluaran pemerintah akan mengakibatkan tingkat pendapatan bertambah dari $Y_1 - Y_1'$. Akan tetapi, pertambahan pendapatan tidak sebesar *Keynesian range* karena pemerintah (dalam *intermediate range*) harus menawarkan suku bunga yang lebih tinggi agar masyarakat mau membeli atau meminjamkan kelebihan saldo tunai yang dimiliki mereka. Akan tetapi, naiknya suku bunga akan berakibat pada tingkat investasi, ini berarti efek *ekspansional* pengeluaran pemerintah sebagian diimbangi turunnya investasi.

3. Pada *Classical Range* (Daerah Klasik)

Berpindahnya skedul IS dari IS_1 ke IS_2' tidak berpengaruh sama sekali terhadap tingkat pendapatan, karena dalam kondisi ini tidak ada kelebihan saldo tunai dalam masyarakat sehingga pengeluaran pemerintah yang dipinjam dari masyarakat (sektor swasta) hanya akan meningkatkan suku bunga. Dimana suku bunga yang meningkat menyebabkan lebih menguntungkan membeli obligasi pemerintah dibandingkan mengadakan investasi. Jadi pengeluaran pemerintah ini hanya merupakan pengganti dari investasi sektor swasta sebesar pinjaman pemerintah tersebut. Jika pinjaman

pemerintah ini dibelanjakan, maka tingkat pendapatan pasti tidak akan berubah, karena setiap satu pengeluaran pemerintah hanya pengganti 1 penurunan investasi sektor swasta. Oleh sebab itu, dalam kondisi (daerah klasik) kebijakan fiskal tidak akan efektif dijalankan.

2.1.3 Penerimaan Pemerintah

Penerimaan pemerintah dapat berbentuk pajak, berbagai macam pungutan (charges), ataupun pinjaman. Pajak dan pungutan ditarik dari sektor swasta tanpa mengakibatkan timbulnya kewajiban bagi pemerintah terhadap pihak pembayar. Sedangkan pinjaman merupakan suatu penarikan yang dilakukan sebagai pengganti janji pemerintah untuk membayar kembali pada suatu hari di masa mendatang beserta bunga selama periode pinjaman (Musgrave, 1991:16). Pada dasarnya, penerimaan negara terbagi atas dua jenis penerimaan, yaitu dari pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Secara umum di negara manapun sumber penerimaan negara terbesar adalah dari pajak yang tersedia bagi pemerintah untuk membiayai usaha pembangunan. Pajak adalah iuran wajib dari masyarakat kepada negara dimana pada pembayaran tersebut masyarakat tidak mendapat kontraprestasi secara langsung. Menurut Undang-undang No 20 Tahun 1997 tentang PNBP terdiri atas beberapa kelompok yaitu:

- 1 Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah;
- 2 Penerimaan dari pemanfaatan Sumber Daya Alam;
- 3 Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan;
- 4 Penerimaan dari pelayanan yang dilaksanakan pemerintah;
- 5 Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;
- 6 Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah; dan
- 7 Penerimaan lainnya yang diatur dalam undang-undang tersendiri.

Penerimaan negara baik dari pajak maupun bukan pajak digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara. Ada dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend*. Disebut fungsi *budgetair* karena pajak sebagai sumber penerimaan negara yang utama artinya pajak ini digunakan untuk

mengumpulkan dana guna membiayai kegiatan negara khususnya kegiatan rutin seperti belanja barang, belanja pegawai, untuk subsidi daerah otonom, untuk membayar pinjaman dan bunganya, untuk cadangan pangan, untuk pembangunan, dan lain sebagainya. Fungsi *regulerend* yang berarti pajak berfungsi untuk mengatur dan mengawasi swasta dalam kegiatan ekonomi yang secara luas digunakan untuk mengatur baik produsen maupun konsumen dalam mencapai kebutuhannya masing-masing.

Pajak dibedakan menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung dalam pengertian ekonomi adalah pajak yang beban pajaknya tidak dapat digeserkan kepada pihak lain, sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang beban pajaknya dapat digeserkan kepada pihak lain. Pajak langsung, biasanya lebih tepat digunakan untuk memperbaiki distribusi pendapatan, karena beban pajaknya tidak dapat digeserkan, sehingga pemerintah betul-betul dapat merencanakan bagaimana sebaiknya agar golongan kaya membayar pajak yang lebih tinggi dibanding golongan miskin (Suparmoko, 1999: 277-278).

Secara umum, pengumpulan pendapatan pajak di negara maju lebih tinggi persentasenya terhadap PDB daripada di negara-negara berkembang. Kemungkinan besar ini terjadi karena di negara-negara maju menghadapi permintaan pengeluaran publik yang lebih besar dan juga mempunyai kapasitas yang lebih besar untuk menghasilkan pendapatan pajak dibanding negara-negara berkembang, sehingga pembangunan yang lebih tinggi akan menyebabkan tercapainya pajak yang lebih tinggi pula. Pada umumnya, pajak langsung yang ditarik dari masyarakat secara pribadi, perusahaan, dan properti berkontribusi sekitar 20% hingga 40% dari pendapatan pajak total bagi sebagian besar negara berkembang. Pajak tidak langsung, seperti bea impor dan ekspor, serta cukai (pajak pembelian, penjualan, dan perputaran), merupakan sumber utama pendapatan fiskal untuk negara berkembang (Todaro dan Smith, 2006:339).

Pajak dapat dinilai dari dua sisi yang terkesan berbenturan, yaitu dari aspek ekonomi mikro dan dari aspek ekonomi makro. Pada aspek ekonomi mikro, pajak menyebabkan distorsi ekonomi sehingga mekanisme pasar/harga yang menguntungkan bagi produsen maupun konsumen akan terhambat. Sedangkan

dari aspek ekonomi makro, adanya pajak memberikan kemudahan untuk membiayai kegiatan negara. Setiap dikenakannya pajak terhadap wajib pajak, akan menurunkan jumlah uang yang siap dibelanjakan dan ini berdampak pada tingkat semangat orang untuk bekerja.

Ada dua cara dalam meningkatkan jumlah penerimaan pajak, yaitu melalui intensifikasi pajak dan ekstensifikasi pajak. Intensifikasi pajak adalah usaha untuk meningkatkan penerimaan jumlah pajak dalam batas-batas perundang-undangan yang berlaku, yaitu dengan: (i) meningkatkan jumlah wajib pajak; (ii) mengurangi dan apabila mungkin menghilangkan segala macam pelanggaran, penghindaran, dan kenakalan pajak; serta (iii) meningkatkan tarif pajak. Sedangkan ekstensifikasi pajak adalah usaha meningkatkan jumlah penerimaan pajak melalui dua cara, yaitu dengan jumlah objek pajak yang sama diusahakan mengadakan pemungutan pajak baru dan menambah jumlah obyek pajak agar lebih banyak macam pajak yang dapat dipungut.

2.1.4 Teori Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Pada dasarnya, ekonomi sumber daya alam dan lingkungan berupaya agar pemanfaatan SDA dalam memenuhi kebutuhan manusia dapat berlangsung secara berkesinambungan, agar kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia tidak mengabaikan kelestarian SDA lingkungan. Isu pemanfaatan SDA oleh manusia adalah kelangkaan. Kelangkaan adalah suatu keadaan dimana kebutuhan manusia yang tidak terbatas harus dihadapkan pada SDA yang keberadaannya terbatas. Ada beberapa teori yang memaparkan tentang kelangkaan tersebut, diantaranya (Larasaty, 2011):

1. Teori Thomas Robert Malthus

Menurutnya, kelangkaan terjadi karena pertumbuhan manusia yang tidak diimbangi oleh peningkatan ketersediaan pangan. Manusia berkembang seperti deret ukur (2,4,8,16 dst), sementara pertumbuhan produksi makanan hanya meningkat sesuai deret hitung (2,4,6,8, dst) karena perkembangan manusia jauh lebih cepat dibanding pertumbuhan produksi. Maltus meramal bahwa pada suatu masa akan terjadi kelangkaan pangan.

2. Teori David Ricardo

Menurutnya, kelangkaan disebabkan karena penurunan kualitas lahan dan kesuburan sehingga diperlukan input yang lebih banyak. Degradasi lahan menyebabkan output yang dihasilkan menurun dan keuntungan menjadi berkurang.

3. Teori John Stuart Mill, yang menyatakan bahwa kelangkaan terjadi karena lemahnya sistem kelembagaan dan tidak ramah sosial.

Ada beberapa upaya dalam menghindari kelangkaan diantaranya dengan peningkatan teknologi, penggunaan SDA substitusi, perdagangan, eksplorasi dan penemuan, serta pemanfaatan kembali dan daur ulang (Larasaty, 2011). Indonesia adalah salah satu negara yang kaya akan SDA-nya, baik migas maupun non migas. Akan tetapi, kemakmuran suatu negara tidak dapat diukur dari banyaknya sumber daya yang ada di negara tersebut, karena sedikit banyaknya SDA tergantung dari cara pengolahannya. Ada negara yang kemakmurannya tinggi dengan SDA yang sedikit dan ada pula negara yang kemakmurannya rendah dengan SDA yang melimpah. Hal ini sesuai dengan teori *Resource Curse Theory* (Teori kutukan SDA) yang dikembangkan oleh Richard Auty (1993) yang menjelaskan bahwa suatu negara yang kaya akan SDA-nya, terutama yang tidak dapat diperbarui seperti SDA migas, cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang lamban dibandingkan dengan negara yang sedikit SDA-nya. Fenomena ini dapat disebabkan karena tidak efektif, tidak stabil, dan pengelolaan SDA yang salah.

2.1.5 Pengeluaran Pemerintah

Dalam bukunya *The General Theory of Employment, Interest, and Money* Keynes menyatakan bahwa pendapatan total perekonomian, dalam jangka pendek sangat ditentukan oleh keinginan rumah tangga, perusahaan dan pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya. Semakin banyak masyarakat yang mengeluarkan pendapatannya, semakin banyak barang dan jasa yang bisa dijual perusahaan. Semakin banyak perusahaan menjual, semakin banyak output yang akan mereka produksi dan semakin banyak pekerja yang akan dikaryakan. Jadi masalah selama

resesi dan depresi, menurut Keynes adalah pengeluaran yang tidak cukup (Mankiw, 2002:274).

Belanja pemerintah dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengeluaran konsumsi dan pengeluaran investasi. Pengeluaran konsumsi atas barang dan jasa memberikan manfaat langsung, tetapi tidak meningkatkan produksi masa depan. Misalnya, pengeluaran di bidang pariwisata, gaji karyawan, beberapa pengeluaran di bidang pertahanan, dan sebagian besar *transfer payment*. Sedangkan pengeluaran investasi pemerintah untuk meningkatkan modal yang mengarah ke produksi masa depan yang lebih tinggi. Misalnya, membangun jalan, membangun pabrik pengolahan limbah, mendidik siswa, dan vaksinasi anak untuk campak (kesehatan) semua memenuhi syarat sebagai investasi. Meningkatkan baik infrastruktur ekonomi atau kualitas angkatan kerja di masa depan, semua pengeluaran baik untuk barang maupun jasa akan menambah permintaan agregat, dan akhirnya meningkatkan kemampuan bangsa untuk menghasilkan dan meningkatkan output alamiah. Dengan demikian, pembelian pemerintah memiliki efek langsung terhadap permintaan agregat (Dillingham, Skaggs, dan Carlson, 1992).

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu unsur permintaan agregat. Konsep perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran menyatakan bahwa $Y=C+I+G+(X-M)$. Variabel Y melambangkan pendapatan nasional (dalam arti luas), sekaligus mencerminkan penawaran agregat. Sedangkan variabel-variabel diruas kanan disebut permintaan agregat. Sebagai sebuah organisasi atau rumah tangga, pemerintah melakukan banyak sekali pengeluaran untuk membiayai kegiatannya, yang bertujuan untuk menjalankan roda pemerintahan sehari-hari dan membiayai kegiatan perekonomian (Dumairy, 1996:161). Keynes membagi pengeluaran menjadi dua, yaitu pengeluaran aktual dan pengeluaran yang direncanakan. Pengeluaran aktual adalah jumlah uang yang dikeluarkan rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah, atas barang dan jasa yang sama dengan PDB. Sedangkan pengeluaran aktual adalah jumlah uang yang akan dikeluarkan rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah atas barang dan jasa.

Pengeluaran aktual selalu berbeda dari pengeluaran yang direncanakan (Mankiw, 2002:274).

Menurut Ek. Browing ada beberapa kriteria yang digunakan untuk menilai kebijaksanaan pemerintah, yaitu keadilan, efisiensi ekonomi, kebapaan (paternalisme), dan kebebasan perseorangan. Klasifikasi pengeluaran pemerintah dapat digolongkan menjadi:

1. Self Liquidating, maksudnya pengeluaran negara yang langsung mendapatkan pengeluaran kembali dari pihak yang menerima barang atau jasa. Misalnya, pengeluaran negara untuk jasa-jasa perusahaan negara (PT. Garuda dan Merpati, DAMRI, PT. KAI, PELNI, dll) atau pengeluaran negara untuk proyek-proyek barang ekspor;
2. Reproductive, yaitu pengeluaran negara yang mendapatkan keuntungan langsung dari masyarakat sehingga masyarakat mampu membayar pajaknya dan pendapatan negara menjadi bertambah. Misalnya negara memperbaiki waduk atau bendungan dan pengeluaran negara untuk bidang pertanian, pengairan, serta kesehatan;
3. Tidak Self Liquidating dan Reproductive, yaitu pengeluaran negara yang langsung menambah kegembiraan dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, pengeluaran negara untuk pembangunan monumen dan tempat-tempat wisata lainnya;
4. Non-Productive dan merupakan pemborosan, yaitu pengeluaran negara untuk ketahanan pangan; dan
5. Penghematan di masa yang akan datang, yaitu pengeluaran negara untuk anak-anak terlantar dan yatim piatu.

Adapun bidang-bidang yang dikenai pengaruh oleh adanya pengeluaran pemerintah adalah:

1. Konsumsi masyarakat, bahwa pengeluaran negara akan dapat merubah pola dan besarnya pengeluaran masyarakat dengan menaikkan tingkat konsumsi baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya pengeluaran di bidang pariwisata dan di bidang jasa-jasa pendidikan dan pengajaran;

- 2 Produksi, bahwa pengeluaran negara bersamaan dengan faktor produksi seperti modal, alam, tenaga kerja, dan pengusaha merupakan faktor produksi yang akan menambah pendapatan. Misalnya pengeluaran di bidang pendidikan, ini akan menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas;
- 3 Distribusi, bahwa pengeluaran negara dapat mempengaruhi tingkat distribusi pendapatan dan kebudayaan di masyarakat. Misalnya pengeluaran negara di bidang pendidikan untuk seluruh masyarakat; dan
- 4 Keseimbangan pendapatan nasional, bahwa pengeluaran negara akan meningkatkan pendapatan masyarakat, artinya keseimbangan pendapatan nasional akan tercapai.

Faktor penentu pengeluaran pemerintah adalah jumlah pajak yang akan diterima, tujuan-tujuan kegiatan ekonomi jangka pendek dan pembangunan ekonomi jangka panjang, serta pertimbangan politik dan keamanan. Berdasarkan faktor penentu tersebut, pendapatan nasional tidak memegang peranan penting dalam menentukan pembelanjaan pemerintah. Misalnya, ketika perekonomian mengalami masa resesi, pendapatan pajak akan berkurang dan jumlah pengangguran semakin meningkat. Maka, untuk mengatasi pengangguran ini pemerintah perlu melakukan lebih banyak program-program pembangunan sehingga pengeluaran pemerintah perlu ditambah. Sebaliknya, ketika terjadi inflasi dan tingkat kemakmuran tinggi, pemerintah berusaha menurunkan pengeluarannya (Sukirno, 1995:151-153).

2.1.6 Teori Pengeluaran Pemerintah

Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang pengeluaran pemerintah dalam perekonomian suatu negara, diantaranya (Prasetya, 2012:4-8):

1 Model Pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal terjadinya pembangunan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar karena pemerintah harus

menyediakan fasilitas dan pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Pada tahap menengah, investasi pemerintah masih diperlukan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat semakin meningkat. Akan tetapi, pada tahap ini peranan investasi swasta juga semakin besar. Musgrave memiliki pendapat bahwa investasi swasta dalam persentase terhadap PNB semakin besar dan persentase investasi pemerintah dalam persentase terhadap PNB akan semakin kecil.

2 Teori Adolf Wagner

Pada tahun 1880-an, ahli ekonomi Jerman Adolph Wagner mengemukakan tentang “hukum peningkatan pengeluaran pemerintah” yang disebabkan karena adanya perang, kenaikan penghasilan masyarakat, urbanisasi, perkembangan demokrasi, dan pengeluaran yang terjadi karena pemborosan. Teori Adolf Wagner menyatakan bahwa apabila pendapatan per kapita meningkat, maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan, dan sebagainya.

3 Teori Peacock dan Wiseman

Teori ini didasarkan pada suatu analisis penerimaan pengeluaran pemerintah. Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan memperbesar penerimaan dari pajak, padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Dalam teori ini, terdapat efek penggantian, yaitu adanya gangguan sosial yang menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah.

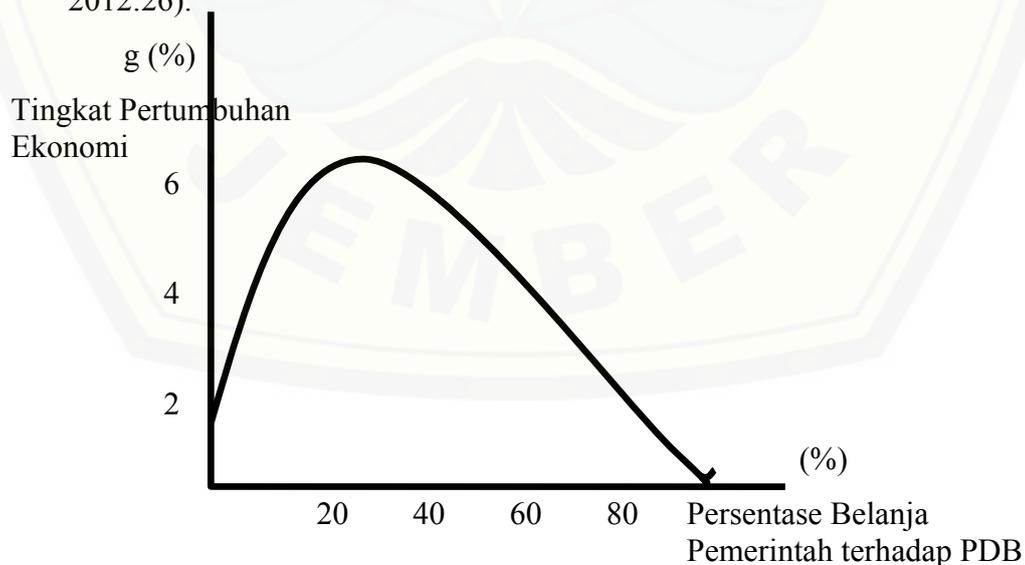
4 Teori Batas Kritis Colin Clark

Pada teorinya, Colin Clark mengemukakan hipotesis tentang batas kritis perpajakan. Toleransi tingkat pajak dan pengeluaran pemerintah diperkirakan kurang dari 25 persen dari PNB, meskipun anggaran belanja pemerintah tetap seimbang. Menurutnya, apabila kegiatan sektor pemerintah yang diukur

dengan penerimaan pajak dan bukan pajak melebihi 25 persen dari total kegiatan ekonomi, maka yang terjadi adalah inflasi. Dasar yang dikemukakan adalah bahwa pajak yang tinggi akan mengurangi gairah kerja. Akibatnya, produktivitas akan turun dengan sendirinya dan ini akan mengurangi penawaran agregat. Di sisi lain, pengeluaran pemerintah yang tinggi akan berakibat pada naiknya permintaan agregat. Inflasi terjadi karena adanya keseimbangan baru yang timbul karena adanya kesenjangan antara permintaan dan penawaran agregat.

5 Teori Kurva Rahn

Kurva ini menjelaskan hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi. Apabila pengeluaran pemerintah nol, pertumbuhan ekonomi akan sangat rendah karena prasarana (infrastruktur) ekonomi yang tersedia dalam perekonomian sangat sedikit. Namun, produksi nasional akan melambung secara dramatis apabila pemerintah bersedia membiayai pembangunan infrastruktur ekonomi. Jadi, pada tingkat belanja tertentu, kenaikan belanja pemerintah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara drastis. Namun, pada tingkat belanja pemerintah yang terlalu besar, justru akan menurunkan pertumbuhan ekonomi (Mitchell dalam Algifari, 2012:26).



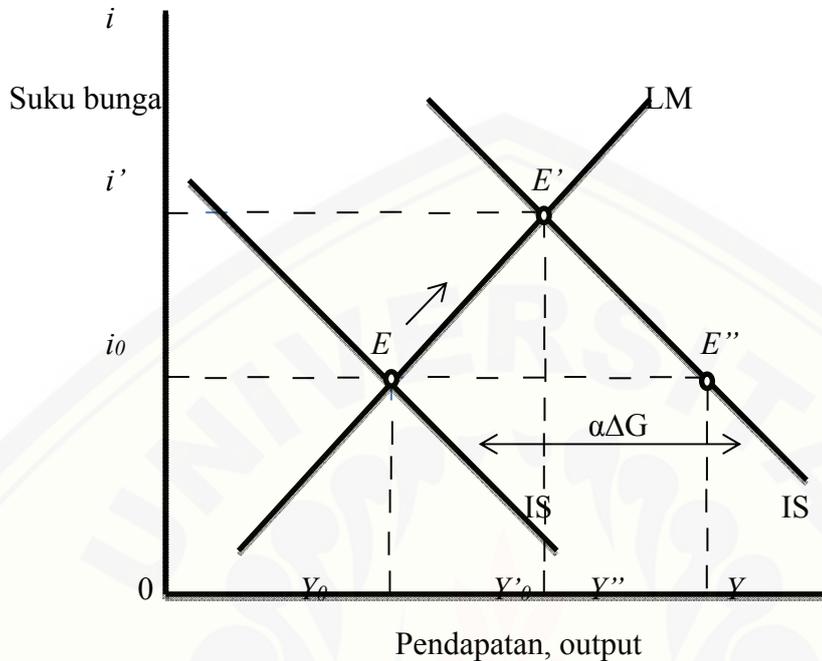
Gambar 2.2 Kurva Rahn

2.1.7 Kebijakan Fiskal dalam Proses Pendesakan (*Crowding Out*)

Kebijakan fiskal dalam jangka panjang akan mempengaruhi tabungan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan dalam jangka pendek kebijakan fiskal mempengaruhi permintaan agregat akan barang dan jasa (Mankiw, 2002:297). Pengaruh kebijakan fiskal yang terlalu ekspansif akan mengakibatkan proses pendesakan (*crowding out*) karena akan menyebabkan naiknya suku bunga sehingga mengurangi pengeluaran swasta, terutama investasi. Kebijakan fiskal mempengaruhi permintaan agregat secara langsung. Misalnya, kenaikan pengeluaran pemerintah dalam menaikkan permintaan agregat cenderung menaikkan output. Akan tetapi, kenaikan output akan meningkatkan suku bunga di pasar modal, dan dengan demikian mengurangi efek dari kebijakan fiskal terhadap output. Suku bunga yang lebih tinggi akan mengurangi tingkat pengeluaran investasi, atau membatasi (*crowding out*) investasi. Jadi, kebijakan fiskal yang dimaksudkan untuk meningkatkan output kemungkinan akan mengurangi tingkat investasi (Dornbusch dan Fischer, 1987:141).

Perubahan dalam kebijakan fiskal akan menggeser kurva IS (*investment-saving*). Pada perekonomian dua sektor, keseimbangan pasar barang terjadi pada saat keinginan menabung sama dengan keinginan investasi. Kurva IS yaitu kurva yang menunjukkan hubungan negatif antara tingkat bunga dengan berbagai tingkat pendapatan nasional yang menjamin keseimbangan di pasar barang. Kurva IS mempunyai kemiringan yang menurun karena turunnya suku bunga dapat menaikkan permintaan akan investasi, sehingga akan meningkatkan permintaan agregat dan tingkat output di pasar barang berada dalam kondisi ekuilibrium. Tingkat investasi memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pendapatan nasional suatu negara. Semakin banyak masyarakat yang melakukan investasi akan semakin banyak dana dari masyarakat yang terkumpul pada Bank, dana tersebut dapat digunakan sebagai penstabil perekonomian ketika perekonomian mengalami krisis. Investasi sangat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Semakin tinggi tingkat suku bunga maka akan semakin banyak masyarakat yang tertarik untuk melakukan investasi, begitu juga sebaliknya. Dampak proses pendesakan

(*crowding out*) pada kebijakan fiskal yang dapat mempengaruhi suku bunga dapat dilihat pada kurva dibawah ini (Dornbusch dan Fischer, 1987:142-145).



Gambar 2.3 Kurva proses pendesakan (*crowding out*)

Pada suku bunga yang tidak berubah, tingkat pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi akan menaikkan tingkat permintaan agregat sehingga untuk memenuhi permintaan yang meningkat akan barang-barang ini, output harus naik. Kurva diatas menunjukkan pergeseran kurva IS. Pada setiap tingkat suku bunga, pendapatan ekuilibrium harus naik sebesar $\bar{\alpha}$ kali pengeluaran pemerintah. Misalnya, apabila pengeluaran pemerintah naik dengan 100 dan multiplier adalah 2, maka pendapatan ekuilibrium pada setiap tingkat suku bunga harus naik sebesar 200. Jadi, skedul kurva IS bergeser ke kanan sebesar 200

Apabila perekonomian pada mulanya berada dalam kondisi ekuilibrium di titik E , dan sekarang pengeluaran pemerintah naik sebesar 100, maka kurva IS akan bergerak ke titik E'' jika suku bunga dipertahankan konstan. Pada titik E'' pasar barang berada dalam kondisi akualibrium karena pengeluaran yang direncanakan sama dengan besarnya output. Akan tetapi, pasar aktiva tidak lagi berada pada kondisi ekuilibrium. Pendapatan telah naik, oleh sebab itu permintaan akan uang sekarang lebih tinggi. Dengan suku bunga i_0 , permintaan untuk saldo riil sekarang melebihi jumlah penawaran uang riil yang telah ditentukan. Karena

terdapat kelebihan permintaan untuk saldo riil, suku bunga menjadi naik. Akan tetapi, begitu suku bunga naik, pengeluaran swasta berkurang. Pengeluaran investasi yang direncanakan perusahaan menurun pada suku bunga yang lebih tinggi, dan dengan demikian permintaan agregat menurun. Pada gambar tersebut, memperlihatkan hanya bahwa pada titik E' baik pasar barang maupun pasar modal menyesuaikan diri. Hanya pada titik E' pengeluaran yang direncanakan sama dengan pendapatan, dan pada saat yang sama, jumlah saldo riil yang diminta sama dengan jumlah persediaan uang riil yang telah ditentukan. Karena titik E' merupakan titik ekuilibrium yang baru.

Ekspansi fiskal menaikkan pendapatan dan suku bunga tergantung pada kemiringan kurva IS, LM, dan besarnya multiplier. Adapun faktor-faktor dalam kurva IS-LM yang menentukan kondisi penyesuaian suku bunga dalam mengurangi ekspansi output maka akan diketahui letak ekspansi fiskal dalam menaikkan pendapatan dan suku bunga yaitu dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan berikut ini (Dornbusch dan Fischer, 1987:144-145):

1. Semakin datar kurva LM, maka pendapatan naik lebih besar dan suku bunga naik lebih kecil.
2. Semakin datar skedul IS, maka pendapatan naik lebih kecil, dan suku bunga naik lebih kecil.
3. Semakin besar multiplier α , maka akan semakin besar pergeseran garis yang horizontal dari skedul IS, maka pendapatan dan suku bunga akan lebih besar naiknya.

2.1.8 Teori Pendapatan Nasional

Secara umum, prestasi ekonomi suatu negara dapat diukur melalui pendapatan nasional. Pendapatan nasional bukan hanya berguna untuk menilai perkembangan ekonomi suatu negara dari waktu ke waktu, tetapi juga membandingkannya dengan negara lain. Di samping itu, dari angka pendapatan nasional dapat diperoleh ukuran turunannya seperti pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita (Dumairy, 1996:37). Menurut Suparmoko (1999:12), pendapatan nasional merupakan jumlah seluruh pendapatan yang diperoleh

sebagai hasil dari proses menghasilkan barang dan jasa yang meliputi upah dan gaji, bunga, modal, sewa atas barang-barang modal termasuk rumah serta keuntungan atau laba.

Pengertian pendapatan nasional secara luas, dapat merujuk ke Produk Domestik Bruto, Produk Nasional Bruto, Produk Nasional Neto (PNN), dan Pendapatan Nasional (NI). Perhitungan pendapatan nasional Indonesia dimulai dengan PDB, yang dapat diukur dan dihitung melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran (Dumairy, 1996:38). PDB adalah pendapatan total dan pengeluaran total nasional atas output barang dan jasa perekonomian (Mankiw, 2002:16). Berdasarkan keempat konsep agregat ekonomi diatas, dapat diukur pertumbuhan ekonomi riil, dengan cara menghilangkan pengaruh perubahan harga yang melekat pada angka-angka agregat ekonomi menurut harga berlaku, sehingga terbentuk angka agregat ekonomi menurut harga konstan tahun tertentu (Dumairy, 1996, 38-39).

Konsep dan perhitungan pendapatan nasional merupakan persiapan yang sangat pokok untuk menangani permasalahan ekonomi, seperti masalah pengangguran, inflasi, siklus bisnis, dan pertumbuhan ekonomi (Nasution, 1997:62). Melalui data perhitungan pendapatan nasional dapat dijadikan sebagai acuan dalam menyusun dan mengaplikasikan kebijakan ekonomi, serta pengukuran efisiensi kinerja perekonomian suatu negara. Perhitungan pendapatan nasional didasarkan pada nilai pasar barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam tahun tertentu (McEachern, 2000:156). Apabila pengeluaran agregat (permintaan total) sama besarnya dengan pendapatan nasional akan terjadi keseimbangan pendapatan nasional. Keseimbangan perekonomian dapat dicapai apabila investasi sama dengan *saving* ($S=I$). Instrumen kebijakan fiskal dan inflasi berpengaruh pada keseimbangan pendapatan nasional (Suparmoko, 1999:61).

Tingkat pendapatan nasional ekuilibrium adalah tingkat dimana jumlah pengeluaran diinginkan dan pengeluaran induksi sama dengan tingkat pendapatan nasional. Pengeluaran induksi adalah pengeluaran yang bergantung pada tingkat pendapatan nasional. Kebijakan pembelanjaan dan pajak pemerintah mempengaruhi pendapatan nasional ekuilibrium dengan dua cara penting.

Pertama, pembelian pemerintah adalah bagian dari pengeluaran otonomi, sehingga perubahan pada pembelian pemerintah ΔG akan menyebabkan perubahan pada pendapatan nasional ekuilibrium dari pengganda dikali ΔG . Kedua, pajak harus dikurangi dari pendapatan nasional (dan pembayaran transfer pemerintah harus ditambahkan) dalam memperoleh pendapatan disposabel. Ini karena pendapatan disposabel menentukan pengeluaran konsumsi (Lipsey, *et al.*, 1995:96-97).

Pengeluaran pemerintah seperti *government expenditure* (G) dan *government transfer* (Tr) merupakan salah satu variabel yang dapat meningkatkan permintaan agregat. Maka pendapatan nasional masyarakat suatu negara dengan peran pemerintah yang secara aktif menjalankan politik fiskal dapat dirumuskan sebagai berikut (Nasution, 1997:180-181):

$Y = C + I + G$, dari pendapatan nasional tersebut, sebagian akan dipergunakan untuk konsumsi, tabungan, dan membayar pajak. Masuknya variabel pajak pada pendapatan nasional, maka rumusannya menjadi:

$$Y = C + S + T_x$$

Untuk melihat keseimbangan pendapatan nasional dengan masuknya variabel perhitungan variabel pengeluaran pemerintah dan pajak dapat dirumuskan:

$$Y = C + I + G$$

$$Y = C + S + T_x$$

Perumusan pendapatan nasional akan mengalami perubahan sesuai dengan perubahan perumusan konsumsi, sehingga pendapatan nasional dapat dirumuskan menjadi:

$$Y = C + I + G$$

$$= a + MPC (Y + Tr - T_x) + I + G$$

$$= a + MPC Y + MPC Tr - MPC T_x + I + G$$

$$Y - MPC Y = a + MPC Tr - MPC T_x + I + G$$

$$Y (1 - MPC) = a + MPC Tr - MPC T_x + I + G$$

$$Y = \frac{a + MPC Tr - MPC T_x + I + G}{(1 - MPC)}$$

2.1.9 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu kenaikan output barang dan jasa total suatu negara dan pendapatan totalnya yang dapat diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB). Pertumbuhan ekonomi lebih tepat diukur dengan menggunakan pertumbuhan pendapatan perkapita menuntut adanya kenaikan PDB atau pendapatan nasional. PDB sangat ditentukan oleh digunakannya faktor produksi tenaga kerja, kapital, barang sumberdaya alam, tingkat teknologi, dan kondisi sosial negara tersebut. Pada umumnya terdapat hubungan positif antara jumlah dan kualitas faktor-faktor produksi tersebut dan PDB (Suparmoko, 1999:239). Apabila laju pertumbuhan ekonomi tinggi, produktivitas barang dan jasa meningkat akan memungkinkan bagi kenaikan standar hidup masyarakat. Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi biasanya akan menurunkan tingkat pengangguran dan memperluas kesempatan kerja (Dornbusch dan Fischer, 1987:14).

Keseimbangan makroekonomi sangat dipengaruhi oleh sisi permintaan dan sisi penawaran agregat. Kebijakan fiskal bertujuan untuk mempengaruhi sisi permintaan agregat suatu perekonomian dalam jangka pendek dan mempengaruhi sisi penawaran dalam jangka panjang, melalui peningkatan kapasitas perekonomian (Surjaningsih., *et al*, 2012:390). Meskipun dampak sisi penawaran dalam jangka pendek kurang begitu penting, namun dalam jangka panjang dampak tersebut dapat menjadi faktor penting dalam menentukan pertumbuhan ekonomi (Musgrave, 1991:25).

Faktor utama penentu output kapasitas adalah tingkat input faktor produksi, seperti sumberdaya alam, tenaga kerja dan modal, serta tingkat teknologi atau produktivitas sumberdaya yang digunakan. Karena persediaan sumberdaya alam tergantung pada alam, penentu utama pertumbuhan PNB adalah tingkat pertumbuhan tenaga kerja dan modal, serta laju perkembangan teknologi, seperti yang dikemukakan oleh beberapa ahli ekonomi (Musgrave, 1991:27). Teori pertumbuhan ekonomi menurut Solow menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, tingkat tabungan perekonomian menunjukkan ukuran persediaan modal dan tingkat produksinya. Semakin tinggi tingkat tabungan, semakin tinggi pula

persediaan modal dan semakin tinggi tingkat output. Selain itu, menurutnya semakin tinggi tingkat pertumbuhan populasi, semakin rendah tingkat output dan tingkat modal per pekerja. Teori Solow ini lebih melihat dari sisi permintaan atau sisi produksi. Teori lain melihat efek lain dari pertumbuhan populasi. Maltus memperlihatkan pertumbuhan populasi akan membebani sumberdaya alam yang diperlukan untuk memproduksi makanan, sementara Kremer menunjukkan bahwa populasi yang besar bisa meningkatkan kemajuan teknologi (Mankiw, 2002:208).

Adam Smith berpandangan bahwa pertumbuhan akan dicapai apabila ada pembagian kerja dalam setiap berproduksi yang akan mendorong spesialisasi, artinya setiap orang tidak perlu menghasilkan setiap barang yang dibutuhkan secara sendiri-sendiri melainkan menghasilkan satu jenis barang saja. Peningkatan kesejahteraan akan dicapai dari peningkatan laba dengan melakukan investasi, yaitu membeli mesin-mesin dan peralatan yang lebih canggih sehingga produktivitas tenaga kerja akan meningkat. Peningkatan tenaga kerja ini akan meningkatkan produksi perusahaan dan apabila setiap perusahaan melakukan hal yang sama, maka output nasional dan pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu pertumbuhan penduduk, persediaan barang-barang modal, luas tanah, dan kekayaan alam. Selain teori pembagian kerja, teori nilai dan teori akumulasi modal juga merupakan teori yang dikembangkan Adam Smith untuk mencapai pertumbuhan ekonomi (Deliarnov, 2010:32-42).

Keynes yang berbeda pandangan dengan kaum Klasik lebih menyukai kebijakan fiskal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, apalagi ketika terjadi krisis. Menurutnya, apabila pengangguran meningkat, pemerintah bisa memperbesar pengeluarannya untuk proyek-proyek yang mampu menyerap tenaga kerja. Dengan demikian, sebagian tenaga kerja yang menganggur akan bekerja dan memperoleh pendapatan. Kebijakan ini sangat ampuh dalam meningkatkan output dan memberantas pengangguran, terutama pada situasi saat sumberdaya belum dimanfaatkan secara penuh. Demikian juga ketika terjadi inflasi, pemerintah bisa menarik jumlah uang beredar dengan mengenakan pajak yang lebih tinggi sehingga inflasi dapat dikendalikan. Dalam situasi terjadi gerak

gelombang kegiatan ekonomi, pemerintah dapat menjalankan kebijakan pengelolaan pengeluaran dan pengendalian permintaan efektif dalam bentuk “kontra siklis” dan “anti siklis”. Keynes juga tidak setuju dengan pendapat kaum klasik yang mengatakan bahwa jumlah tabungan akan selalu sama dengan jumlah investasi. Menurut Keynes, secara umum investasi akan lebih kecil dari jumlah tabungan sehingga permintaan agregat juga lebih kecil dari penawaran agregat (Deliarnov, 2010:164-170).

Belanja publik terutama untuk komponen inti atau komponen produktif secara signifikan berpengaruh dan berdampak positif pada tingkat pertumbuhan PDB riil per kapita. negara-negara harus memiliki lingkungan kebijakan yang memadai dengan stabilitas makroekonomi, keterbukaan dan investasi sektor swasta yang kondusif untuk pertumbuhan (Moreno, *et al* 2011).

2.2 Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda-beda dari dampak penerimaan dan pengeluaran pemerintah terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi, diantaranya ialah penelitian yang dilakukan oleh Muharman (2013) dengan menggunakan data runtun waktu perekonomian Indonesia tahun 1970 sampai dengan 2012 dengan pendekatan dinamis *Error Correction Mechanism* (ECM), variabel yang digunakan yaitu pajak, belanja negara, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam jangka pendek belanja negara lebih memiliki dampak terhadap PDB, karena belanja negara direspon langsung oleh mekanisme pasar yang memperoleh dampak kejutan akibat kenaikan belanja negara. Sedangkan dalam jangka panjang, kejutan dari belanja negara menurun menuju keseimbangan karena pasar dapat menyesuaikan atas kenaikan belanja negara. Pengaruh belanja negara dalam jangka pendek dan jangka panjang sama besarnya terhadap inflasi. Pada sisi pajak, dalam jangka panjang pajak lebih besar memberikan dampak terhadap output nasional dibandingkan dalam jangka pendeknya.

Hasil penelitian Surjaningsih, *et al.*, (2012) memberikan hasil bahwa pengeluaran pemerintah memberikan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sedangkan peningkatan penerimaan pemerintah berupa peningkatan pajak memberikan dampak peningkatan inflasi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data triwulanan periode 1990-2009 dengan model VECM. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sirait (2013) memaparkan bahwa Penerimaan pajak dalam jangka pendek memiliki pengaruh yang positif dan dalam jangka panjang memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sementara itu, pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh yang tidak signifikan pada pertumbuhan ekonomi baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Akan tetapi, penerimaan negara bukan pajak berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian ini menggunakan model ECM, variabel yang digunakan dari pajak, non pajak, pengeluaran pemerintah, dan GDP dengan data kuartalan tahun 1990-2012.

Penelitian Blanca Moreno-Dodson dan Nihal Bayraktar dengan menggunakan data tahun 1970-2005 di beberapa negara yang dibagi menjadi dua kelompok, kelompok pertama yaitu Korea, Singapura, Malaysia, Thailand, Indonesia, Botswana, dan Mauritius. Kelompok kedua, yaitu Chili, Kosta Rika, Meksiko, Filipina, Turki, dan Uruguay, dan Replublika Bolivariana de Venezuela yang digunakan sebagai kelompok pembanding tujuannya untuk lebih menguji pengaruh belanja publik pada pertumbuhan di negara-negara berkembang. Hasil penelitiannya memaparkan bahwa Belanja publik terutama untuk komponen produktif secara signifikan berpengaruh dan berdampak positif pada tingkat pertumbuhan PDB riil per kapita dalam kelompok pertama, sementara link yang sama tidak dapat didirikan ro-bustly untuk kelompok pembanding. Selain itu, dampak kebijakan fiskal signifikan secara statistik hanya untuk kelompok pertama.

Pada penelitian Algifari (2012) yang bertujuan untuk menyelidiki dampak dari pengeluaran pemerintah dan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan menggunakan data tahun 1970-2010. Hasil penelitiannya memaparkan bahwa pengeluaran rutin pemerintah seperti belanja pegawai,

belanja barang, subsidi daerah otonom, pembayaran bunga utang pemerintah, dan pengeluaran rutin lainnya memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap PDB di Indonesia. Adanya hubungan negatif karena pengeluaran rutin di Indonesia cenderung kurang efektif dan efisien. Sedangkan pengeluaran pembangunan atau belanja untuk daerah memiliki dampak positif terhadap PDB, namun tidak signifikan terhadap PDB di Indonesia karena pembangunan infrastruktur berdampak positif terhadap aktivitas ekonomi.



Tabel 2.3 Ringkasan penelitian sebelumnya

No	Nama Peneliti	Judul, Metode, dan Variabel	Hasil Penelitian
1	Muharman, 2013	Analisis Dinamis Pengaruh Instrumen Fiskal Terhadap PDB dan Inflasi di Indonesia melalui metode Error Corection Mechanism (ECM). Variabel yang digunakan pajak, belanja negara, inflasi, dan PDB	Pajak dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap PDB baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Sedangkan pengaruhnya terhadap inflasi hanya dalam jangka pendek saja yang berpengaruh positif.
2	Surjaningsih, et. al. (2012)	<i>The Impact Of Fiscal Policy On The Output And Inflation</i> melalui metode Vector Error Correction Model (VECM). Variabel yang digunakan total pengeluaran pemerintah riil, penerimaan pajak riil, PDB riil, IHK, suku bunga deposito berjangka, nilai volatilitas dari PDB. Inflasi, diskresi, kurs, dan output GAP	Dalam jangka pendek kenaikan pengeluaran pemerintah berdampak positif terhadap PDB, sedangkan kenaikan pajak berdampak negatif. Dalam jangka panjang, kenaikan pengeluaran pemerintah berdampak negatif terhadap PDB, sedangkan kenaikan pajak berdampak positif. Selain itu, pengeluaran pemerintah dapat menurunkan tingkat inflasi dan kenaikan pajak dapat meningkatkan inflasi.
3	Sirait, 2013	Analisis Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan menggunakan metode Error Corection Model (ECM). Variabel yang digunakan, penerimaan pajak, bukan pajak, pengeluaran pemerintah, dan PDB	Penerimaan pajak memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sedangkan dalam jangka panjang pajak memiliki pengaruh negatif. Sementara itu pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh tidak signifikan pada pertumbuhan ekonomi baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Akan tetapi, Penerimaan negara bukan pajak berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi.
4	Moreno, et. al (2011)	<i>How Public Spending Can Help You Grow: An Empirical Analysis For Developing Countries</i> melalui analisis kuantitatif dan kualitatif di beberapa negara	Belanja publik terutama untuk komponen produktif secara signifikan berpengaruh dan berdampak positif pada tingkat pertumbuhan PDB riil per kapita.
5	Afonso, Antonio dan Souse (1993)	<i>The Macro Economic Effect On Fiscal Policy</i> dengan menggunakan skema identifikasi rekursif dan memperkirakan model Baynesian	Secara umum, guncangan pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh kecil terhadap PDB; menyebabkan crowding out effect; memiliki dampak yang bervariasi pada harga perumahan dan penurunan

		Structural Vector Autoregression (B-SVAR)	terhadap harga saham. Guncangan pendapatan pemerintah menghasilkan efek yang kecil dan positif pada harga perumahan dan harga saham sehingga menyebabkan apresiasi nilai tukar efektif
6	Algifari, 2012	Pengaruh Belanja Pemerintah dan Penerimaan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, Pendekatan ECM. Menggunakan data periode 1970-2010. Variabel yang digunakan pengeluaran pemerintah pusat, pengeluaran untuk daerah, pajak, dan PDB	Pengeluaran rutin memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap PDB. Pengeluaran pembangunan atau belanja untuk daerah memiliki dampak positif terhadap PDB, namun tidak signifikan. Pajak memiliki dampak positif dan signifikan terhadap PDB di Indonesia.
7	Alexiou, C. (2009)	Government Spending and Economic Growth: Econometric Evidence from the South Eastern Europe (SEE) melalui metode OLS	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah, investasi swasta, perdagangan bebas mempunyai dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan pertumbuhan penduduk berdampak negatif.

2.3 Kerangka Konseptual

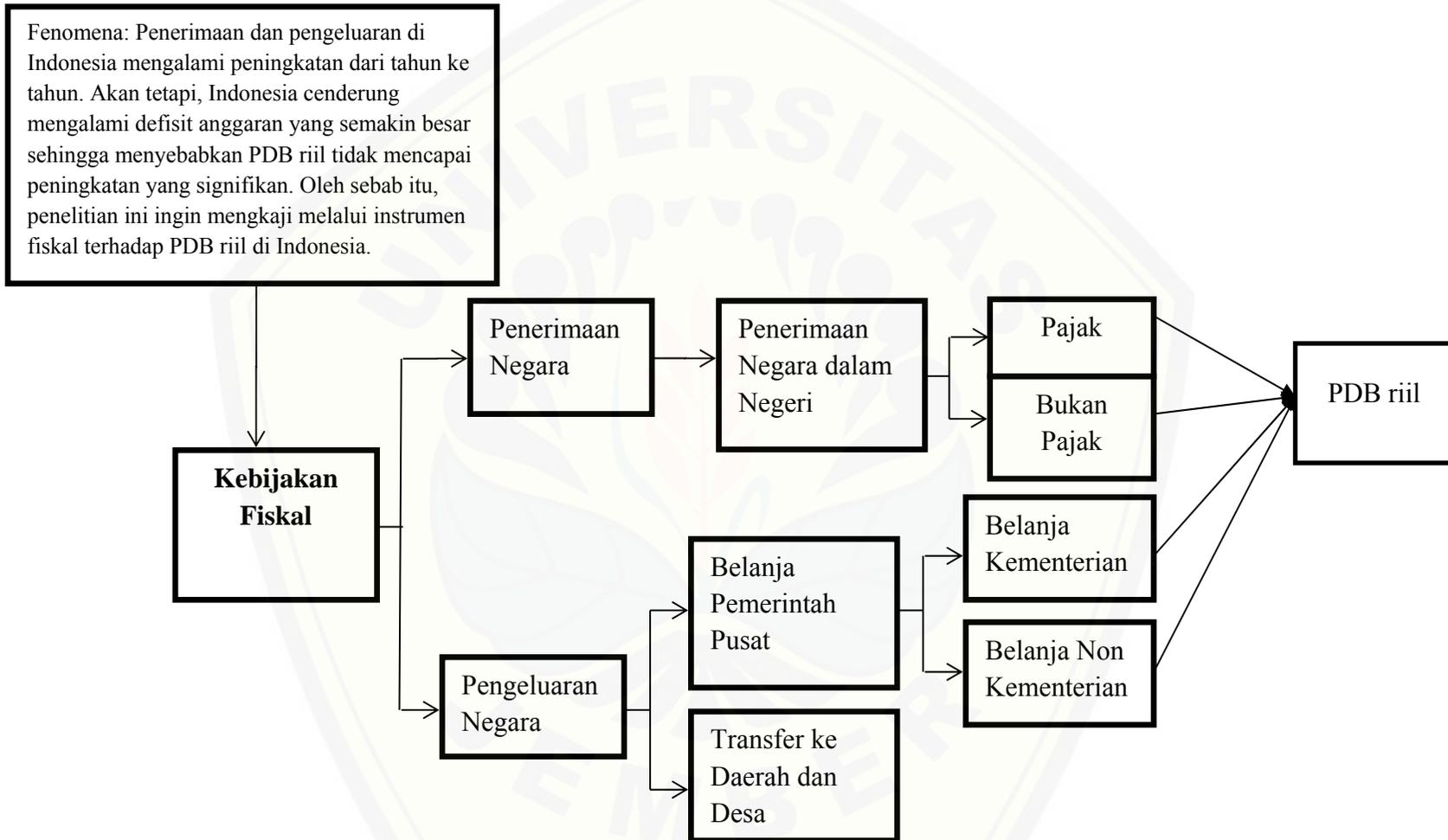
Kerangka konseptual ini menjelaskan kerangka berpikir yang dilakukan oleh peneliti selama melakukan penelitian sebagai pedoman dan gambaran alur pemikiran peneliti dalam fokus pada tujuan penelitian. Penelitian ini berfokus pada dampak kebijakan fiskal terhadap pendapatan nasional di Indonesia. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui penyesuaian di bidang penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Tujuan utama kebijakan pengaturan melalui instrumen fiskal adalah untuk menjaga stabilitas harga agar inflasi tetap stabil dan tercapainya kesempatan kerja penuh yang akan berpengaruh pada tingkat PDB riil suatu negara. Penerimaan dan pengeluaran pemerintah ini tersusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Instrumen kebijakan fiskal terdiri atas penerimaan dan pengeluaran negara. Secara keseluruhan penerimaan negara terdiri atas penerimaan dalam negeri dan hibah. Penerimaan dalam negeri ini meliputi penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak. Komponen penerimaan negara dari pajak meliputi pajak dalam negeri (PPH baik migas maupun non migas, PBB, BPHTB, Cukai, dan pajak lainnya), serta pajak perdagangan internasional, yaitu bea masuk dan pajak ekspor. Seluruh penerimaan tersebut akan masuk ke kas negara/pemerintah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dengan tujuan untuk pembangunan ekonomi dan menjaga stabilitas perekonomian secara makro.

Penerimaan dan pengeluaran negara secara keseluruhan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal yang ekspansif atau kebijakan fiskal yang kontraktif. Seluruh penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, yaitu belanja negara untuk pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa. Belanja pemerintah pusat tersebut terbagi menjadi dua, yaitu belanja untuk Kementerian Lembaga dan belanja untuk Non Kementerian Lembaga. Pada sisi pengeluaran negara, penelitian ini terfokus pada pengeluaran pemerintah secara keseluruhan baik belanja negara untuk Kementerian Lembaga maupun Non Kementerian Lembaga.

Kebijakan anggaran dalam APBN terbagi menjadi tiga, yaitu surplus anggaran, anggaran berimbang, dan defisit anggaran. Selama 30 tahun terakhir, penerimaan dan pengeluaran di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Akan tetapi, Indonesia sering mengalami defisit anggaran sehingga pertumbuhan PDB riil di Indonesia cenderung moderat dan tidak mencapai peningkatan yang signifikan karena defisit anggaran akan mempengaruhi pasar uang dan pasar barang serta jasa. Kedua pasar tersebut akan mempengaruhi permintaan agregat yang akan berpengaruh pada besarnya laju inflasi. Tinggi rendahnya inflasi akan mempengaruhi pertumbuhan PDB riil negara tersebut.

Secara umum, unsur pokok yang paling penting untuk menentukan PDB riil adalah dilihat dari permintaan agregat dan penawaran agregat. Kebijakan fiskal berpengaruh secara langsung pada permintaan dan penawaran agregat melalui pasar uang dan modal serta pasar barang dan jasa. Pada sisi permintaan agregat dipengaruhi oleh penerimaan pemerintah (pajak), pengeluaran pemerintah, dan uang. Sedangkan modal, tenaga kerja, sumber daya dan teknologi mempengaruhi penawaran agregat, dimana permintaan dan penawaran agregat ini saling berinteraksi yang akan mempengaruhi pertumbuhan output melalui PDB riil. Keseimbangan pada kurva permintaan dan penawaran agregat akan mempengaruhi laju pertumbuhan PDB riil di Indonesia karena apabila barang yang diinginkan masyarakat terpenuhi dengan harga yang stabil akan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Semakin besar pengeluaran masyarakat yang digunakan untuk konsumsi, semakin cepat perputaran uang yang beredar dalam perekonomian. Hal ini menunjukkan aktivitas ekonomi akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan atau tidak lesu. Melalui instrumen penerimaan negara dari pajak, non pajak, dan pengeluaran pemerintah secara keseluruhan.

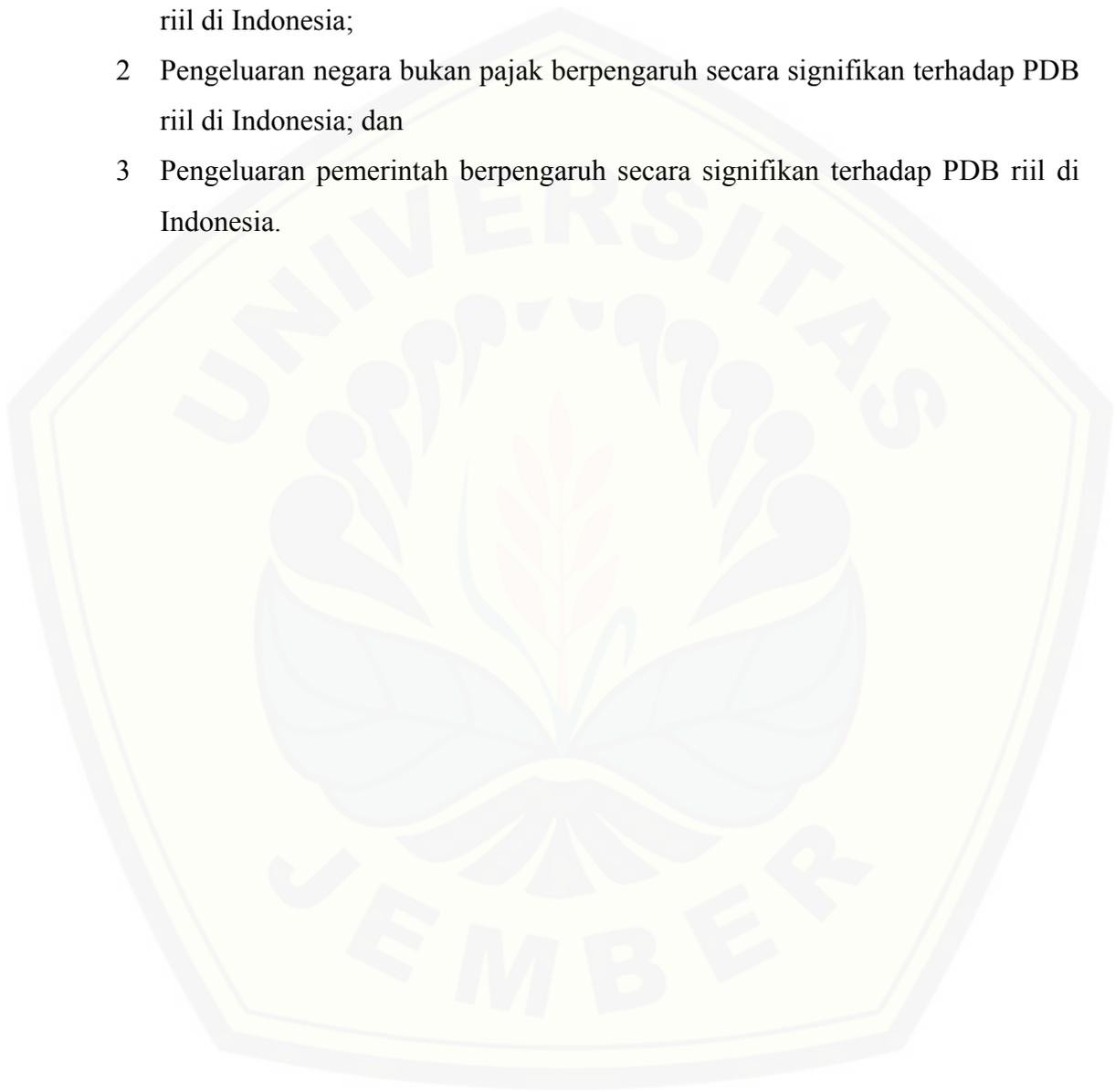


Gambar 2.3 Kerangka konseptual

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

- 1 Penerimaan negara dari pajak berpengaruh secara signifikan terhadap PDB riil di Indonesia;
- 2 Pengeluaran negara bukan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap PDB riil di Indonesia; dan
- 3 Pengeluaran pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap PDB riil di Indonesia.



BAB 3. METODE PENELITIAN

Pada bab 3 akan memaparkan secara rinci tentang aspek-aspek metode penelitian yang terdiri atas jenis dan sumber data pada subbab 3.1, spesifikasi model penelitian pada subbab 3.2, metode dan alat analisis data pada subbab 3.3, serta definisi operasional dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini yang dijelaskan pada subbab 3.6. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif *Ordinary Least Square* (OLS).

3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa runtun waktu (*time series*) dengan rentan waktu penelitian dari tahun 1984 sampai dengan 2015, dengan objek penelitian negara Indonesia yang bersumber dari *World Bank*, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, dan Kementerian Keuangan. Data yang digunakan adalah data penerimaan negara baik pajak maupun bukan pajak, data pengeluaran negara secara keseluruhan, dan data PDB riil di Indonesia.

Alasan ekonomi dan metodologis memilih rentan waktu penelitian pada tahun 1984 sampai dengan 2015 adalah yang pertama karena selama kurun waktu tersebut banyak terjadi fenomena ekonomi dalam perekonomian Indonesia seperti krisis moneter tahun 1997/1998 dan krisis keuangan global tahun 2008 yang berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sehingga dengan rentan waktu yang cukup lama tersebut diharapkan dapat mengetahui efektifitas penerapan kebijakan fiskal di Indonesia. Kedua, karena selama kurun waktu tersebut terus menunjukkan peningkatan pengeluaran pemerintah yang lebih besar dibanding dengan penerimaannya sehingga Indonesia sering mengalami defisit anggaran. Ketiga, karena menggunakan data tahunan, dengan rentan waktu yang cukup panjang diharapkan penelitian ini dapat meminimumkan kesalahan estimasi, sehingga hasil penelitian dapat memenuhi asumsi BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*). Penelitian ini dirancang untuk mengetahui bagaimana

pengaruh kebijakan fiskal sebagai alat stabilisasi di Indonesia terhadap pertumbuhan PDB riil di Indonesia.

3.2 Spesifikasi Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS) yang diadopsi dari penelitian sebelumnya. Menurut Keynes, kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang paling efektif dilakukan ketika perekonomian mengalami masa depresi atau resesi. Melalui peningkatan pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk proyek-proyek yang mampu menyerap tenaga kerja, maka dengan sendirinya pengangguran akan berkurang dan output akan meningkat. Sedangkan menurut kaum klasik, penerapan kebijakan fiskal memiliki efek *crowding out* yang hanya akan meningkatkan suku bunga dan menurunkan investasi sehingga kurang efektif diterapkan dalam perekonomian karena tidak berpengaruh baik terhadap pendapatan nasional.

Secara umum, variabel kebijakan fiskal terdiri atas penerimaan pemerintah, pengeluaran pemerintah, dan defisit fiskal. Pajak dan pengeluaran pemerintah merupakan instrumen kebijakan fiskal. Peningkatan pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk bantuan sosial dan pembangunan infrastruktur akan berpengaruh baik terhadap kelancaran kegiatan ekonomi. Namun, kenaikan pengeluaran pemerintah biasanya akan diikuti dengan kenaikan pajak. Kenaikan pajak akan berdampak negatif terhadap kegiatan ekonomi, karena kenaikan pajak menyebabkan berkurangnya tabungan masyarakat. Berkurangnya tabungan masyarakat akan menurunkan investasi dan kegiatan ekonomi (Algifari, 2012:25).

Dampak defisit fiskal yang tinggi dapat menyebabkan kenaikan tingkat inflasi, begitu halnya perekonomian dengan tingkat inflasi yang tinggi akan berdampak buruk pada perekonomian (Sutawijaya dan Lestari, 2013:67). Berdasarkan penjelasan tersebut, model kebijakan fiskal terhadap pendapatan nasional awalnya dapat diidentifikasi sebagai fungsi dari:

$$PDB \text{ riil} = f(TX, NTX, GOV) \dots\dots\dots (3.1)$$

Untuk mendapatkan metode analisis klausul maka model ekonomi tersebut ditransformasikan ke dalam bentuk model ekonometrika. Adapun model ekonometrikanya adalah:

$$PDB_{riil_t} = \beta_0 + \beta_1 TX_t + \beta_2 NTX_t + \beta_3 GOV_t \dots \dots \dots (3.2)$$

Kemudian untuk mendapatkan regresi dalam sampel atau dikenal dengan fungsi regresi sampel maka dari model ekonometrika deterministik diatas diturunkan dalam model stokastik. Adapun model stokastiknya adalah:

$$PDB_{riil_t} = b_0 + b_1 TX_t + b_2 NTX_t + b_3 GOV_t + e_t \dots \dots \dots (3.3)$$

dimana:

PDB riil adalah Produk Domestik Bruto (milyar rupiah)

TX adalah penerimaan negara dari pajak (milyar rupiah)

NTX adalah penerimaan negara bukan pajak (milyar rupiah)

GOV adalah pengeluaran pemerintah secara keseluruhan (milyar rupiah)

t adalah *time series*

e adalah *error term*

3.3 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan analisis deskriptif dan kuantitatif. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan fenomena-fenomena ekonomi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan pembahasan berdasarkan hasil yang didapat. Sedangkan metode analisis kuantitatif digunakan untuk mengukur dan menghitung dari suatu fenomena ekonomi yang akan dibahas dengan sumber data-data kuantitatif yang ada. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *time series*. Data *time series* umumnya bersifat non stasioner dan diperoleh melalui *rondom walk* (Sutawijaya dan Lestari, 2013).

Agar hasil estimasinya baik dan terhindar dari regresi lancung perlu diuji kestasionerannya melalui uji validasi *Ordinary Least Square* (OLS) serta model yang akan digunakan perlu dilakukan pengujian statistik agar model mempunyai sifat BLUE. Regresi lancung terjadi jika koefisien determinasi cukup tinggi tetapi hubungan antara variabel-variabel independen dan variabel dependen tidak

mempunyai makna. Hal ini terjadi karena hubungan keduanya merupakan data *time series* yang hanya menunjukkan trend saja. Jadi tingginya koefisien determinasi karena trend bukan karena hubungan antar keduanya. Suatu data dikatakan stasioner apabila variasi perilaku data tidak terlalu besar dan mempunyai kecenderungan untuk mendekati rata-ratanya. Data *time series* cenderung memiliki masalah autokorelasi yang mengakibatkan data *time series* menjadi tidak stasioner atau non-stasioner.

3.3.1 Metode *Ordinary Least Square* (OLS)

Metode ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel-variabel independen seperti pajak, non pajak, dan pengeluaran pemerintah terhadap variabel dependen yaitu PDBriil, serta menunjukkan arah hubungan diantara variabel tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun model dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = b_0 + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e_t \dots\dots\dots (3.2)$$

dimana:

- Y = Produk Domestik Bruto (milyar rupiah)
- b_0 = konstanta persamaan regresi
- b_1, b_2, b_3 = koefisien variabel independen
- X_1 = penerimaan negara dari pajak (milyar rupiah)
- X_2 = penerimaan negara bukan pajak (milyar rupiah)
- X_3 = pengeluaran negara secara keseluruhan (milyar rupiah)
- e = variabel pengganggu
- t = data *time series*

Nilai koefisien regresi dalam penelitian ini sangat menentukan sebagai dasar analisis. Hal ini berarti jika koefisien β bernilai positif maka dapat dikatakan terjadi pengaruh searah antara variabel independen dengan variabel dependen, setiap kenaikan nilai variabel independen akan mengakibatkan kenaikan variabel dependen, demikian pula sebaliknya.

3.3.2 Uji Signifikansi

Penentuan signifikansi dengan membandingkan nilai probabilitas dengan α (derajat kepekaan) dari suatu variabel yang digunakan. Pada penelitian ini menggunakan nilai α sebesar 0,05 atau 5%. Apabila nilai probabilitasnya $< \alpha$ (5%) dapat disimpulkan variabel tersebut signifikan berpengaruh dan sebaliknya apabila nilai probabilitasnya $> \alpha$ (5%) maka tidak signifikan berpengaruh.

3.3.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik ini dilakukan untuk melihat apakah hasil estimasi telah memenuhi asumsi dasar linier klasik yang juga biasa disebut dengan asumsi BLUE. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri atas uji linieritas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas.

1 Uji Linieritas

Estimasi model dengan uji linieritas digunakan untuk mengetahui hubungan linieritas model penelitian. Umumnya, uji linieritas menggunakan estimasi melalui uji *Ramsey* dimana hasil estimasi akan menunjukkan apakah model bersifat linier atau tidak. Penentuan linieritas dilakukan dengan membandingkan nilai F-statistik dengan nilai F-tabel dan perbandingan nilai probabilitas dengan α (derajat kepekaan). Apabila F-statistik $>$ nilai F-tabel maka model tersebut tidak linier, dan apabila nilai probabilitasnya $< \alpha$ (5%) maka dapat dikatakan model tersebut tidak linier.

2 Uji Multikolinieritas

Istilah multikolinieritas mengacu pada Ragnar Fisch, yang berarti keadaan atau hubungan linear yang sempurna atau tepat diantara sebagian atau seluruh variabel penjelas dalam sebuah model regresi (Gujarati, 2013). Hubungan linear antara variabel independen dapat terjadi dalam bentuk hubungan linier yang sempurna (*perfect*) dan hubungan linear yang kurang sempurna (*imperfect*). Model yang mempunyai standart error besar dan nilai statistik t yang rendah merupakan indikasi awal adanya multikolinieritas dalam model. Namun,

multikolinieritas dapat terjadi dalam model yang kurang bagus. Salah satu ciri adanya gejala multikolinieritas adalah model mempunyai koefisien determinasi yang tinggi (R^2), yaitu antara 0,7 – 1,0 (Widarjono, 2004; Supranto, 2004).

Apabila terjadi multikolinieritas sempurna, koefisien regresi dan variabel penjelas tidak dapat ditentukan dan variansnya tak terhingga, sedangkan apabila terjadi multikolinieritas tidak sempurna, koefisien regresi dari variabel penjelas dapat ditentukan tetapi variansnya sangat besar (Manurung, 2005). Jadi, uji multikolinieritas dilakukan untuk melihat apakah terdapat hubungan linear antara beberapa atau semua variabel independen dari model regresi. Apabila dalam model regresi terdapat gejala multikolinieritas, maka model tersebut tidak dapat menaksir secara tepat sehingga diperoleh kesimpulan yang salah tentang variabel yang diteliti.

3 Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan gejala adanya korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut deret waktu (*time series*). Gejala autokorelasi observasi terjadi pada suatu persamaan yang akan menyebabkan persamaan tersebut memiliki selang kepercayaan yang semakin lebar dan pengujian menjadi kurang akurat sehingga hasil dari uji-t dan uji-f menjadi tidak sah dan penaksiran regresi menjadi sensitif terhadap fluktuasi penyampelan. Hasil tersebut dapat mengakibatkan menolak H_0 (Gujarati, 2004). Secara harifiah autokorelasi berarti adanya korelasi antara anggota observasi satu dengan observasi lain yang berlainan waktu (Widarjono, 2004). Uji autokorelasi dapat dihitung dengan uji Durbin Watson, yaitu:

$$P=1 -\frac{1}{2}dW$$

Rumusan Hipotesis:

$H_0 : P = 0$, artinya antara variabel bebas pajak, non pajak, dan pengeluaran pemerintah terhadap variabel terikat PDB riil tidak terdapat autokorelasi

$H_1 : \neq 0$, artinya variabel bebas pajak, non pajak, pengeluaran pemerintah terhadap variabel terikat terdapat autokorelasi.

Kriteria Pengujian:

- 1) Jika dW, dL , atau $dW > 4 - dL$, maka H_0 ditolak, berarti ada autokorelasi positif maupun negatif;
- 2) Jika $dU < dW < 4 - dU$, maka H_0 diterima, berarti tidak ada autokorelasi;
- 3) Jika $dU < dW < dU$ atau $4 - dU < 4 - dL$, maka tidak ada kesimpulan.

4 Uji Heteroskedastisitas

Varian residual yang tidak konstan disebut heteroskedastisitas dan varian residual yang konstan disebut homoskedastisitas. Heteroskedastisitas sering ditemui dalam data cross section. Sementara itu, data time series jarang mengandung unsur heteroskedastisitas. Hal ini terjadi karena ketika menganalisis perilaku data yang sama dari waktu ke waktu fluktuasinya akan relatif stabil (Widarjono, 2005). Heteroskedastisitas akan menyebabkan varians tidak minimum sehingga estimator dari model tidak lagi efisien. Oleh sebab itu, perlu dilakukan uji heteroskedastisitas untuk mengetahui varians pada model regresi konstan atau heterogen (Rosadi, 2011).

Cara mendeteksi adanya masalah heteroskedastisitas adalah dengan membandingkan nilai X^2 dengan X^2 tabel, apabila X^2 hitung $<$ daripada X^2 tabel maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Selain itu juga dapat membandingkan nilai probabilitasnya, apabila nilai probabilitas $\text{Obs} * \text{Rsquared} > \alpha$ (5%), maka persamaan tersebut tidak mengalami masalah heteroskedastisitas. Masalah heteroskedastisitas dapat disembuhkan dengan metode *white*.

5 Uji Normalitas

Salah satu asumsi yang sering digunakan dalam analisis runtun waktu adalah asumsi data mengikuti distribusi normal (Rosadi, 2011). Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah faktor pengganggu telah berdistribusi normal atau tidak. Uji signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen melalui uji t hanya akan valid jika residual yang akan didapatkan mempunyai distribusi normal. Ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk mendeteksi apakah residual mempunyai distribusi normal atau tidak. Salah

satunya melalui uji yang dikembangkan oleh Jarque-Bera (J-B). Untuk mendeteksi residual berdistribusi normal atau tidak dengan cara membandingkan J-B X^2 , apabila nilai J-B $< X^2$ tabel maka residualnya berdistribusi normal. Selanjutnya, dengan cara membandingkan probabilitas JB-nya yaitu apabila nilai probabilitas JB $> \alpha$ (5%) maka residualnya berdistribusi normal.

3.6 Definisi Operasional Variabel

1 Pendapatan nasional

Pada penelitian ini pendapatan nasional diukur dengan PDB riil harga konstan dengan tahun dasar 2000 dalam milyar rupiah. PDB riil adalah pendapatan total dan pengeluaran total atas output barang dan jasa perekonomian pada suatu periode tertentu. Pendapatan nasional digunakan untuk mengukur dan menilai perkembangan ekonomi suatu negara.

2 Pajak

Pajak merupakan iuran wajib masyarakat kepada kas negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang dengan pembayaran pajak ini masyarakat tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung. Penerimaan pajak dalam lingkup penelitian ini meliputi pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional dalam bentuk milyar rupiah. Pajak dalam negeri meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), cukai, dan pajak lainnya. Sedangkan penerimaan pajak perdagangan internasional meliputi bea masuk dan pajak ekspor.

3 Penerimaan negara bukan pajak

Pendapatan negara non pajak adalah pendapatan negara yang diterima negara dari sektor selain pajak yang terdiri atas penerimaan SDA baik migas maupun non migas, surplus BI, pendapatan Badan Layanan Umum (BLU), dan pendapatan non pajak lainnya dalam milyar rupiah.

4 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah adalah belanja sektor pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk belanja pemerintah pusat dan transfer ke Daerah serta Desa.

Belanja pemerintah pusat terdiri atas belanja kementerian lembaga dan belanja non kementerian lembaga. Pengaruh pengeluaran pemerintah pada pendapatan nasional diukur melalui pengeluaran pemerintah secara keseluruhan disetiap tahunnya dalam milyar rupiah.



BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab 5, akan diuraikan kesimpulan penelitian mengenai dampak kebijakan fiskal terhadap pendapatan nasional di Indonesia, baik dari hasil analisis deskriptif maupun dari hasil penelitian yang menggunakan metode analisis kuantitatif. Selain itu, peneliti juga akan memaparkan berbagai kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk peningkatan pendapatan nasional melalui kebijakan fiskal.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan sebelumnya dengan metode OLS, baik berupa analisis deskriptif maupun analisis kuantitatif, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerimaan negara dari pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap PDB riil di Indonesia.
2. Penerimaan negara bukan pajak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap PDB riil di Indonesia.
3. Pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PDB riil di Indonesia.

5.2 Saran

Setiap terjadinya resesi ekonomi akan selalu memberikan efek yang buruk bagi perekonomian Indonesia dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah selalu menerapkan berbagai kebijakan ekonomi dalam mengatasi terjadinya resesi ekonomi, baik kebijakan fiskal, moneter, perdagangan internasional, maupun kebijakan di sektor riil. Namun, meskipun penerapan berbagai kebijakan ekonomi telah dilakukan tetapi kurang memperhatikan masalah kestabilan politik dan keamanan serta masalah sistem hukum dan pelaksanaannya, hasilnya tetap akan kurang sempurna. Terciptanya stabilitas politik dan keamanan akan membantu pemulihan perekonomian dengan cepat. Begitu juga dengan sistem hukum dan

pelaksanaannya harus mampu memberi rasa kepastian hukum dan keadilan. Karena di Indonesia, sistem politik dan keamanan serta sistem hukum dan pelaksanaannya cenderung kurang stabil. Pemerintah Indonesia perlu memperhatikan peraturan serta kebijakan yang akan dilaksanakan. Hal ini dilakukan agar dalam penerapan kebijakan fiskal dapat melakukan fungsinya dengan baik, sehingga defisit anggaran dalam APBN dapat dikurangi dan tidak terjadi pembengkakan pada anggaran negara untuk tahun-tahun selanjutnya. Pendapatan nasional akan lebih cepat tumbuh apabila tidak terjadi defisit anggaran. Pemerintah dapat melakukan beberapa kebijakan yaitu:

1. Pemerintah harus lebih memperbaiki dan mengawasi dalam sistem penerimaan negara baik dari pajak maupun bukan pajak, serta meminimalisir adanya kecurangan dalam sistem penerimaan pemerintah sehingga masyarakat akan lebih percaya kepada pemerintah;
2. Sistem alokasi yang tepat dalam penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam penyediaan infrastruktur yang memadai sesuai dengan kebutuhan untuk kesejahteraan masyarakat secara efektif dan efisien yang dapat meningkatkan pendapatan nasional; dan
3. Mengurangi pengeluaran pemerintah untuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan lebih digunakan untuk pengeluaran yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan karena pengeluaran pemerintah untuk subsidi BBM termasuk pengeluaran pemerintah yang cukup besar.

DAFTAR BACAAN

- Adhitama, O., Santoso, B. & Riyanto. *Kontribusi Sektor Migas Terhadap Penerimaan Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pembangunan Daerah di Kabupaten Bojonegoro*. Universitas Brawijaya. J. Adm Pub. Vol (2). No (3). hlm:492-498
- Afonso & Souse. 2009. *The Macroeconomic Effect On Fiscal Policy*. Eroupe Central Bank.
- Alesina & Tabellini. 2005. *Why Is Fiscal Policy Often Procyclical?*. America: Harvard University.
- Alexiou, Constantinos. 2009. *Government Spending and Economic Growth: Econometric Evidence from the South Eastern Europe (SEE)*. J. Eco and Soc Research. Vol (11). No (1). hlm.1-16.
- Alfirman., Luky., Sutrisno., dkk. 2006. *Analisis Hubungan Pengeluaran Pemerintah dan Produk Domestik Bruto di Indonesia dengan Menggunakan Pendekatan Granger Causality dan Vector Autoregression*. J. Keu Pub. Vol (4). No (1).
- Algifari. 2009. *Pengaruh Defisit Anggaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Kasus Indonesia)*.
- Algifari. 2012. *Pengaruh Belanja Pemerintah dan Penerimaan Pajak Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, Pendekatan Error Correction Model (ECM)*. J. Eko Bis. ISSN:1978-3116. Vol (6). No (1). Hal.25-39.
- Alim, M Sahirul. 2014. *Karakter Kebijakan (Procyclical VS Countercyclical) dan Stabilitas Makroekonomi: Studi Empiris Asian Emerging Economies Periode 2000-2014*. Universitas Diponegoro.
- Auty, Richard M. 1991. *The Resource Curse: On the Trade-off Betwen Resource Abundance and Development*.
- Badan Pusat Statistik. 2015. *Statistik 70 Tahun Indonesia Merdeka*.
- Bank Indonesia. *Perkembangan Produk Domestik Bruto Tahun 2015*.
- Bappenas. *Hasil Pembangunan dalam Pembangunan Jangka Panjang Pertama*.
- Beeg, D., Fischer, S. & Dornbusch, R. 1991. *Economics third edition*.

- Candoro, Pamungkas. 2015. *Pengaruh Defisit Anggaran Terhadap Inflasi di Indonesia Tahun 2001.Q1-2013.Q4 : Pendekatan Fiscal Theory Of Price Level*. Skripsi, Universitas Jember.
- Chaudhuri, Primit. 1989. *The Economic Theory of Growth*. Great Britain by Billing and Sons Ltd, Worcester.
- Dadson & Bayrahtar. 2011. *How Public Spending Can Help You Grow: An Empirical Analysis From Developing Countries*. World Bank
- Deliarnov, 2010. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dillingham, Alan E., Neil T. Skaggs & Carlson. (Tanpa Tahun). *Economcs*.
- Diulio, Eugene. 1994. *Teori Makroekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Dornbusch, R. & Fischer, S. 1987. *Makroekonomi edisi keempat*. Jakarta: Erlangga.
- Dumairy. 2003. *Matematika Terapan untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE.
- Dumairy. *Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: Erlangga
- Fatas, A. 2008. *Fiscal Policy, Volatility and Growth*. World Bank.
- Fatas, A. & Ilian, M. 2012. *Fiscal Policy as a Stabilization Tool*. The B.E. J. Macroeconomics. World Bank.
- Fatas, A. & Ilian, M. Tanpa Tahun. *The Effect of Fiscal Policy on Consumption and Employment: Theory and Evidence*.
- Gujarati, Damodar. 2003. *Basic Econometric (Fourth edition)*. USA: Mc Graw-Hill International
- Gujarati, Damodar N & Dawn C. Porter. 2013. *Basic Econometric*. Jakarta: Salemba Empat.
- IMF. 2015. *Fiscal Policy and Long-Term Growth*. IMF Policy Paper.
- IMF & World Bank. 2006. *Fiscal Policy For Growth and Development: An Interim Report*.
- Ismail, Rifki. 2011. *Assesing Economic Growth And Fiscal Policy In Indonesia*. J.Eco and Business. Vol (14). No (1). hlm: 53-71
- Juanda, B. & Junaidi. 2012. *Ekonometrika Deret Waktu*. Bogor: IPB Press.
- Kementerian Keuangan. 2014. *Laporan Keuangan BA 015 Tahun Anggaran 2013 (Audited)*.

- Kementerian Keuangan. 2015. *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2014 (Audited)*.
- Kunarjo. 2001. *Majalah Perencanaan Pembangunan: Defisit Anggaran Negara*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Leeper, E. 1991. "Equilibria under 'Active' and 'Passive' Monetary and Fiscal Policies." *Journal of Monetary Economics*. Vol (27). hlm: 129-47.
- Lipsey, Richard G., Courant., dkk. 1995. *Pengantar Makroekonomi Jilid Satu*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Lutkepohl, H., Saikkonen, P. & Trenkler C. 2004. *Testing For The Cointegrating Rank Of A VAR Process With Level Shift At Unknown Time*. *Econometrica* Vol (72). No. (2). hlm: 647-662.
- Mankiw, Gregory N. 2002. *Makroekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Martone, Celso Luiz. 1989. *Fiscal Policy and Stabilization in Brazil*. World Bank.
- McEachern, W. & Triandaru, S. 2000. *Ekonomi Makro Pendekatan Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.
- Moreno, B. & Bayraktar, N. 2011. *How Public Spending Can Help You Grow: An Empirical Analysis for Developing Countries*. World Bank.
- Muharman, Berto. 2013. *Analisis Dinamis Pengaruh instrumen Fiskal Terhadap PDB dan Inflasi di Indonesia*. Skripsi, Universitas Brawijaya.
- Munawar, Dungtji. 2013. *Memahami Pengertian dan Kebijakan Subsidi Dalam APBN*. Kementerian Keuangan.
- Musgrave, R. & Musgrave P. 1991. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek Edisi ke-5*. Jakarta: Erlangga.
- Nachrowi., Usman, D.N. & Usman, H. 2006. *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta: FEUI.
- Nasution, Mulia. 1997. *Teori Ekonomi Makro: Pendekatan Pada Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Karya Unipress.
- Nizar, Muhammad Afdi. 2012. *Dampak Fluktuasi Harga Minyak Dunia Terhadap Perekonomian Indonesia*. *Bul. Ilmiah Litbang Perdgang*. Vol (6). No (2).
- Nota Keuangan. *Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 1998/1999*.
- Nota Keuangan. *Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2004*.
- Nota Keuangan. *Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan Tahun 2014*.
- Nota Keuangan. *Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan Tahun 2015*.

- Pamuji, Teguh. 2008. *Analisis Dampak Defisit Anggaran Terhadap ekonomi Makro di Indonesia (Tahun 1993-2007)*, Tesis, Universitas Diponegoro. Semarang.
- Prasetya, Ferry. 2012. *Modul Ekonomi Publik Teori Pengeluaran Pemerintah*. Universitas Brawijaya Malang.
- Rachmawati, L., Kuncoro, H. & Sebayang, K.D. 2015. *Dampak Kredibilitas Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Universitas Negeri Jakarta.
- Rahman, Habibur Md. 2005. *Relative Effectiveness of Monetary and Fiscal Policies on Output Growth in Bangladesh: A VAR Approach*. World Bank.
- Rahayu, Ani Sri. 2010. *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Robinson, T., Quayle, M. & McEachern, W. 1991. *Macroeconomics a contemporary introduction*. Australia.
- Rofiq, Aunur. 2013. *Kemajuan Ekonomi Indonesia*. Bogor: IPB Press.
- Rosadi, Dedi. 2011. *Analisis Ekonometrika & Runtun Waktu Terapan dengan R*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Rother, Philipp. 2004. *Fiscal Policy And Inflation Volatility*. European Central Bank.
- Sachs, Jeffrey D. & Andrew M.W. 1997. *Natural Resource Abundance And Economic Growth*. Cambridge MA: Harvard University.
- Samuelson, Paul A & Nordhaus William D. 1985. *Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Simorangkir, Iskandar. 2007. *Koordinasi Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal di Indonesia: Suatu Kajian Dengan Pendekatan Game Theory*. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan.
- Sirait, Yani M. 2013. *Analisis Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. Skripsi, Universitas Jember.
- Sutawijaya, A & Lestari, Ety P. 2013. *Penerapan Metode Vector Auto Regression Dalam Interaksi Kebijakan Fiskal dan Moneter di Indonesia*. J. Eko Pem. Vol (14). No (1). Hlm.66-67
- Sukirno, Sadono. 1995. *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*. Edisi Kedua. Jakarta: PT. Karya Grafindo Persada.
- _____. 2006. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Sulistiyono. Tanpa tahun. *Kegiatan Usaha Industri Migas Hubungannya Dengan Dampak dan Tanggung Jawab Kelestarian Lingkungan Hidup*. Vol (5). No (2).
- Suparmoko. 1999. *Pengantar Ekonomika Makro*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Supranto, J. 2005. *Ekonometri buku kesatu*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- _____.2004. *Ekonometri buku kedua*. Jakarta: Graha Indonesia.
- Surjaningsih, Ndari., Utari., dkk. 2012. *The Impact Of Fiscal Policy On The Output And Inflation*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Sutawijaya, A & Lestari, E. 2013. *Penerapan Metode Vector Auto Regession dalam Interaksi Kebijakan Fiskal dan Moneter di Indonesia*. J. Eko Pem. Vol (14). No (1). hlm: 66-67.
- Todaro, Michael P & Stephen C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- _____.2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Universitas Jember. 2011. *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember.
- Weinthal, E & Pauline J.N. 2006. *Combating the Resource Curse: An Alternative Solution to Managing Mineral Wealth*. Artikel. Vol (4). No (1).
- Wardhono, Adhitya. 2004. *Mengenal Ekonometrika Teori dan Aplikasi*. Universitas Jember.
- Widarjono, Agus. 2005. *Ekonometrika Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Winarno, Wing W. 2009. *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Word Bank. 2006. *Fiscal Policy for Growth And Development: An Interim Report*.
- Yadirichukwu, Emeh. 2012. *Analysis of Tax Formation and Impact on Economic Growth in Nigeria*. Int. J. Account and Financial Report. ISSN 2162-3082. Vol. (2). No. 2.

Website:

<http://www.bappenas.go.id/>

<http://www.bi.go.id/>

<http://www.bps.go.id/>

<http://www.imf.org/>

<http://www.kemenkeu.go.id/>

<http://www.worldbank.org/>

LAMPIRAN_LAMPIRAN

LAMPIRAN A. Data PDB riil, data penerimaan dari pajak, data penerimaan negara bukan pajak, dan data pengeluaran pemerintah.

Obs	PDB riil (Milyar Rupiah)	TX (Milyar Rupiah)	NTX (Milyar Rupiah)	GOV (Milyar Rupiah)
1984	700249,64	4788,3	707,7	20560,4
1985	717490,79	6616,9	1685,3	9796,5
1986	759643,7	7645,7	2215,8	9017,9
1987	797063,2	9930,5	1716,9	17357,4
1988	843137,42	12344,6	1532,8	22966
1989	906005,85	16084,1	2038,8	27048,7
1990	942929,45	18240	13343	36143
1991	1008466,48	22345	17840	43091
1992	1073610,67	28850	17658	50288
1993	329775,9	33849	18920	52018
1994	354640,9	40074	19663	59228
1995	383792,9	45023	21242	67303
1996	413797,8	55987	22216	78500
1997	433245,9	64715	23346	89391,3
1998	376374,8	72931	76372	230627
1999	379352,5	22345	17840	43091
2000	398016,8	111064	82870,6	223907,1
2001	411753,48	184737	115105	345578
2002	426942,93	214713	90182	345605
2003	444453,47	248470	94002	377248
2004	1656516,8	278208	122009	427226
2005	1750815,2	351974	180697	565070
2006	1847126,7	425053	229829	699099
2007	1964327,3	492011	198254	752373
2008	2082456,1	609227	282814	989494
2009	2178850,4	651955	218038	1000844
2010	6864133,1	743326	247176	1126146
2011	7287635,3	878685	286567	1320751
2012	7727083,4	1016237	341143	1548310
2013	8156497,8	1148365	349157	1726191
2014	8566271,2	1280389	385391,7	1876873
2015	8976931,5	1379991,6	410340,9	2039483

LAMPIRAN B. Hasil Analisis Deskriptif

Date: 09/01/16
 Time: 19:24
 Sample: 1984 2015

	GDP_R	TX	NTX	G
Mean	2223731.	327380.5	120987.3	449534.1
Median	874571.6	91997.50	63915.85	213927.7
Maximum	8976932.	1379992.	410340.9	1876873.
Minimum	329775.9	4788.300	707.7000	9017.900
Std. Dev.	2856205.	416782.3	131955.9	554854.7
Skewness	1.515512	1.252520	0.842077	1.264197
Kurtosis	3.568157	3.317212	2.317740	3.398083
Jarque-Bera Probability	12.67989 0.001764	8.501125 0.014256	4.402473 0.110666	8.735001 0.012683
Sum	71159389	10476175	3871593.	14385091
Sum Sq. Dev.	2.53E+14	5.38E+12	5.40E+11	9.54E+12
Observations	32	32	32	32

LAMPIRAN C. Hasil Analisis *Ordinary Least Square* (OLS)

Dependent Variable: GDP_R
 Method: Least Squares
 Date: 09/01/16 Time: 19:17
 Sample: 1984 2015
 Included observations: 32

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	456953.4	207388.5	2.203369	0.0360
TX	12.08024	1.606301	7.520535	0.0000
NTX	-20.17198	5.388480	-3.743538	0.0008
G	0.561682	0.517329	1.085734	0.2869
R-squared	0.928746	Mean dependent var		2223731.
Adjusted R-squared	0.921112	S.D. dependent var		2856205.
S.E. of regression	802223.3	Akaike info criterion		30.14463
Sum squared resid	1.80E+13	Schwarz criterion		30.32785
Log likelihood	-478.3141	Hannan-Quinn criter.		30.20536
F-statistic	121.6538	Durbin-Watson stat		1.605010
Prob(F-statistic)	0.000000			

$$\text{GDP_R} = 456953.354794 + 12.0802413649 * \text{TX} - 20.1719792057 * \text{NTX} + 0.561682001006 * \text{G}$$

LAMPIRAN D. Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Linearitas

Ramsey RESET Test

Equation: UNTITLED

Specification: GDP_R C TX NTX G

Omitted Variables: Squares of fitted values

	Value	df	Probability
t-statistic	0.665392	27	0.5114
F-statistic	0.442747	(1, 27)	0.5114
Likelihood ratio	0.520481	1	0.4706

F-test summary:

	Sum of Sq.	df	Mean Squares
Test SSR	2.91E+11	1	2.91E+11
Restricted SSR	1.80E+13	28	6.44E+11
Unrestricted SSR	1.77E+13	27	6.57E+11
Unrestricted SSR	1.77E+13	27	6.57E+11

LR test summary:

	Value	df
Restricted LogL	-478.3141	28
Unrestricted LogL	-478.0538	27

Unrestricted Test Equation:

Dependent Variable: GDP_R

Method: Least Squares

Date: 09/01/16 Time: 19:26

Sample: 1984 2015

Included observations: 32

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	466302.2	209954.2	2.220971	0.0349
TX	9.473085	4.240881	2.233754	0.0340
NTX	-15.31792	9.101798	-1.682956	0.1039
G	0.590255	0.524317	1.125761	0.2702
FITTED^2	1.99E-08	2.99E-08	0.665392	0.5114

R-squared	0.929896	Mean dependent var	2223731.
Adjusted R-squared	0.919510	S.D. dependent var	2856205.
S.E. of regression	810327.3	Akaike info criterion	30.19087
Sum squared resid	1.77E+13	Schwarz criterion	30.41989
Log likelihood	-478.0538	Hannan-Quinn criter.	30.26678
F-statistic	89.53520	Durbin-Watson stat	1.563535
Prob(F-statistic)	0.000000		

2. Uji Multikolinearitas

	TX	NTX	G
TX	1.000000	0.976562	0.846009
NTX	0.976562	1.000000	0.864867
G	0.846009	0.864867	1.000000

Probabilitas $\geq 0,8$ berarti terjadi multikolinearitas. Penyembuhannya dengan *First Difference* (dilakukan estimasi ulang), sehingga:

	D(TX)	D(NTX)	D(G)
D(TX)	1.000000	0.569482	0.056230
D(NTX)	0.569482	1.000000	0.154537
D(G)	0.056230	0.154537	1.000000

3. Uji Autokorelasi

Dependent Variable: GDP_R
 Method: Least Squares
 Date: 09/01/16 Time: 19:17
 Sample: 1984 2015
 Included observations: 32

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	456953.4	207388.5	2.203369	0.0360
TX	12.08024	1.606301	7.520535	0.0000
NTX	-20.17198	5.388480	-3.743538	0.0008
G	0.561682	0.517329	1.085734	0.2869

R-squared	0.928746	Mean dependent var	2223731.
Adjusted R-squared	0.921112	S.D. dependent var	2856205.
S.E. of regression	802223.3	Akaike info criterion	30.14463
Sum squared resid	1.80E+13	Schwarz criterion	30.32785
Log likelihood	-478.3141	Hannan-Quinn criter.	30.20536
F-statistic	121.6538	Durbin-Watson stat	1.605010
Prob(F-statistic)	0.000000		

4. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	0.832076	Prob. F(3,28)	0.4875
Obs*R-squared	2.619317	Prob. Chi-Square(3)	0.4541
Scaled explained SS	3.736203	Prob. Chi-Square(3)	0.2914

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 09/01/16 Time: 19:25

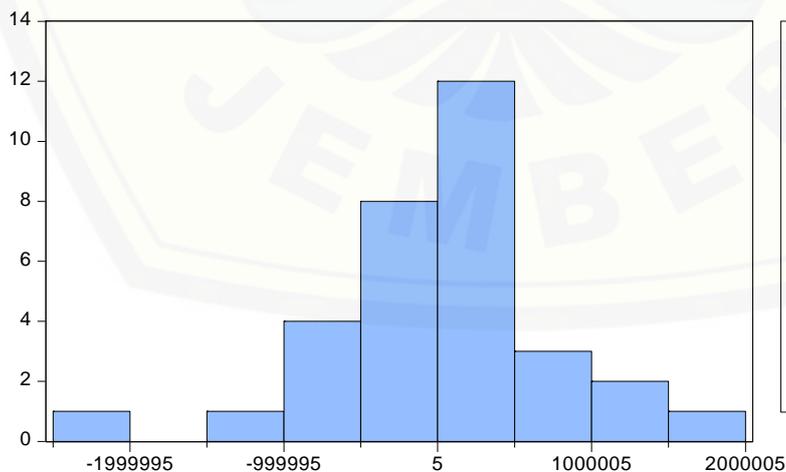
Sample: 1984 2015

Included observations: 32

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.82E+11	2.49E+11	1.531169	0.1369
TX^2	-0.909402	1.677895	-0.541990	0.5921
NTX^2	7.628292	18.66420	0.408712	0.6859
G^2	0.382462	0.348606	1.097119	0.2819

R-squared	0.081854	Mean dependent var	5.63E+11
Adjusted R-squared	-0.016519	S.D. dependent var	1.10E+12
S.E. of regression	1.11E+12	Akaike info criterion	58.43135
Sum squared resid	3.47E+25	Schwarz criterion	58.61457
Log likelihood	-930.9016	Hannan-Quinn criter.	58.49208
F-statistic	0.832076	Durbin-Watson stat	1.311591
Prob(F-statistic)	0.487534		

5. Uji Normalitas



Series: Residuals	
Sample 1984 2015	
Observations 32	
Mean	-9.44e-10
Median	124060.6
Maximum	1781115.
Minimum	-2317775.
Std. Dev.	762418.5
Skewness	-0.558081
Kurtosis	4.726115
Jarque-Bera	5.633720
Probability	0.059793